



**LAPORAN PENELITIAN**

**KESERASIAN SOSIAL PADA DAERAH  
PEMUKIMAN DI KODYA MEDAN  
(STUDI KASUS DI TIGA PEMUKIMAN)**

Oleh :

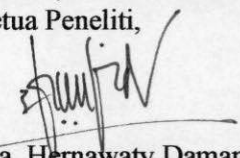
**Dra. Hernawaty Damanik  
Drs. Sihar Pandapotan  
Dra. B. Esti Pramuki**

**PUSAT STUDI INDONESIA (PSI) - LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS TERBUKA  
2001**

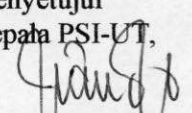
## Lembar Pengesahan Laporan Penelitian Pusat Studi Indonesia – UT

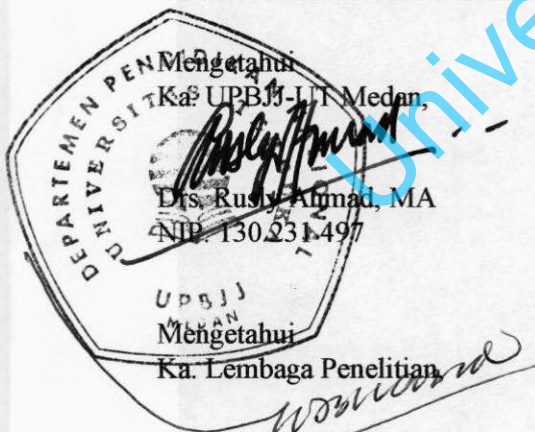
- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <p>a. Judul Penelitian</p> <p>b. Bidang Penelitian</p> <p>c. Klasifikasi Penelitian</p> <p>d. Bidang Ilmu</p>   | <p>: Keserasian Sosial pada Daerah<br/>Pemukiman di Kodya Medan (Studi<br/>Kasus di Tiga Pemukiman)</p> <p>: Studi Indonesia</p> <p>: Penelitian Mandiri</p> <p>: Sosial</p> |
| <hr/> |   |  |
| 2.    | <p>Ketua Peneliti :</p> <p>a. Nama lengkap dan gelar</p> <p>b. NIP</p> <p>c. Golongan Kepangkatan</p> <p>d. Jabatan Akademik</p> <p>e. Fakultas/Unit Kerja</p>  | <p>: Dra. Hernawaty Damanik</p> <p>: 131 787 137</p> <p>: III/C</p> <p>: Lektor Muda</p> <p>: FKIP-UT, dpt. UPBJJ-UT Medan</p>   |
| <hr/> |   |  |
| 3.    | <p>Anggota Tim Peneliti :</p> <p>a. Jumlah Anggota</p> <p>1) Drs. Sihar Pandapotan / 131 851 006 / FKIP-UT, dpt. UPBJJ-UT Medan</p> <p>2) Dra. B. Esti Pramuki / 131 671 548 / FKIP-UT, dpt. UPBJJ-UT Medan</p> | <p>: 2 (dua) orang</p>   |
| <hr/> |   |  |
| 4.    | <p>Lama Penelitian</p>  | <p>: 10 (sepuluh) bulan</p>  |
| <hr/> |   |  |
| 5.    | <p>Biaya Penelitian</p>   | <p>: Rp. 4.010.000,-<br/>(empat juta sepuluh ribu rupiah)</p>  |
| <hr/> |   |  |
| 6.    | <p>Sumber Biaya</p>   | <p>: PSI Lembaga Penelitian<br/>Universitas Terbuka</p>  |

Medan, Maret 2001  
Ketua Peneliti,

  
Dra. Hernawaty Damanik  
NIP. 131 787 137

Menyetujui  
Kepala PSI-UT,

  
Dr. Tian Belawati  
NIP. 131 569 974



Dr. WBP. Simanjuntak, M.Ed  
NIP. 130 212 017

## ABSTRAK

KESERASIAN SOSIAL PADA DAERAH PEMUKIMAN DI KODYA MEDAN  
(STUDI KASUS DI TIGA PEMUKIMAN ) (HERNAWATY, dkk, p. 69; 2001)

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai cara hidup, kebiasaan, adat istiadat, sistem kepercayaan, dan kebudayaan yang berbeda dan secara vertikal adanya perbedaan stratifikasi sosial mengakibatkan bentuk interaksi sosial seringkali bersifat kompleks, sehingga peluang terjadinya benturan antarkelompok, gejolak sosial, dan polarisasi cukup besar.

Membicarakan masalah keserasian sosial tidak dapat dipisahkan dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Tingkat keserasian sosial masyarakat penghuni suatu pemukiman tidaklah sama, sebab pada setiap pemukiman mempunyai latar belakang, struktur dan zona yang berbeda. Pada umumnya konflik terjadi karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakstabilan keadaan di masyarakat yang diakibatkan adanya dinamika dan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Karena keserasian sosial sangat penting bagi masyarakat, perlu diketahui potensi masalah dan konflik-konflik yang terjadi di suatu daerah pemukiman. Dengan demikian kita dapat memberikan kontribusi penyelesaiannya dan mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya konflik yang lebih besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Tingkat keserasian sosial pada daerah pemukiman di Kodya Medan; (2) Bentuk-bentuk konflik yang terjadi pada daerah pemukiman di Kodya Medan; (3) Faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakserasian sosial/konflik pada suatu daerah pemukiman; dan (4) Model

penyelesaian suatu konflik pada daerah pemukiman. Penelitian dilakukan di tiga lokasi pemukiman, yaitu : Kelurahan Polonia – Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Tegal Sari I – Kecamatan Medan Area, dan Kelurahan Lalang – Kecamatan Medan Sunggal. Populasi penelitian ini adalah warga masyarakat yang berada di tiga lokasi pemukiman. Dan yang menjadi sampel penelitian adalah kepala rumah tangga yang terdiri dari berbagai lapisan sosial ekonomi dari berbagai macam profesi seta tokoh masyarakat. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling.

Alat pengumpul data yang digunakan adalah instrumen dalam bentuk angket, pedoman wawancara mendalam, dan pedoman observasi.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Secara umum ketiga lokasi penelitian telah lama terbentuk, melalui kurun waktu yang cukup lama masyarakat telah berbaaur, saling berinteraksi, menetap dalam satu komunitas bersama dan telah berintegrasi secara penuh. Dan sebagai anggota masyarakat para warga tidak memandang perbedaan suku dan agama saat ini ia berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari terlihat adanya keakraban, kebersamaan melalui sikap tolong-menolong, saling mengunjungi mengucapkan selamat dan menghadiri acara-acara perayaan, gotong-royong, siskamling dan adanya Serikat Tolong Menolong (STM).

Bentuk konflik yang terjadi ada yang bersifat laten (tersembunyi) dan terbuka. Konflik yang bersifat laten seperti masih adanya sikap curiga, berprasangka negatif, kurang terbuka, dan kecemburuan sosial. Warga masyarakat etnis Cina masih belum berbaaur secara akrab dengan warga etnis lainnya, mereka

masih bersifat tertutup dan mengucil (*segregatif*), serta partisipasi aktif dalam gotong-royong dan siskamling masih rendah dan tugas kebersamaan ini selalu mereka ganti/kompensasi dengan uang. Walaupun demikian saat konflik massal Mei 1998, warga setempat tidak menunjukkan sikap permusuhan, dan adanya pengrusakan ruko-ruko bukanlah dilakukan penduduk setempat melainkan oleh para demonstran yang melewati daerah tersebut. Konflik terbuka terjadi di kalangan para pemuda baik individu maupun antar Organisasi Kepemudaan (OKP) dan antar organisasi politik saat menjelang Pemilu 1999.

Faktor penyebab konflik adalah masalah generasi muda, ekonomi/kemiskinan, kejahatan/kriminal, dan lingkungan. Konflik antar OKP disebabkan perebutan lahan penjagaan keamanan dan perparkiran. Antara tahun 1995 – 2000 terjadi pasang surut pertikaian antar OKP yaitu Pemuda Pancasila (PP) dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, pengrusakan rumah penduduk dan penjarahan isi rumah. Konflik paling parah terjadi di Kelurahan Polonia – terkenal dengan “Peristiwa Panah Beracun”, kemudian Kelurahan Tegal Sari I dan terakhir Kelurahan Lalang. Di Kelurahan Lalang tidak terjadi konflik antar OKP karena para anggota kedua OKP yang bertikai sebagian masih mempunyai hubungan famili.

Ada tiga model penyelesaian konflik yang ditempuh yaitu *Konsiliasi*, *Mediasi* dan *Arbitrasi*. Dalam mewujudkan keserasian sosial pembinaan aparat kelurahan dan keamanan seperti BABINSA (Koramil) dan Kepolisian turut berperan di ketiga lokasi penelitian.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya laporan ini dapat diselesaikan meskipun mengalami beberapa hambatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang keserasian sosial masyarakat pemukiman di Kodya Medan melalui studi kasus di tiga pemukiman yaitu : di Kelurahan Polonia – Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Tegal Sari I – Kecamatan Medan Area, dan Kelurahan Lalang – Kecamatan Medan Sunggal. Dalam pelaksanaannya kami menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan kekurangan, kiranya kekurangan tersebut dapat dijadikan masukan bagi pelaksanaan penelitian berikutnya.

Penelitian ini dapat dilaksanakan atas kontrak dengan Universitas Terbuka c.q. Pusat Studi Indonesia (PSI) dengan nomor kontrak : 4666/J31.2.3/PG/2000 tanggal 29 Mei 2000.

Terlaksananya penelitian ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada : (1) Kepala Lembaga Penelitian UT, (2) Kepala Pusat Studi Indonesia (PSI) UT, beserta staf atas segala bantuan yang telah diberikan, (3) Kepala UPBJJ – UT Medan yang telah memberi izin pelaksanaan penelitian, (4) BAPEDDA dan Ka. Dit SOSPOL Kodya Medan yang telah memberi izin pelaksanaan penelitian, (5) Kepala Kelurahan Lalang, Tegal Sari I dan Polonia di Kodya Medan, (6) Anggota team peneliti Drs. Sihar Pandapotan dan Dra. B. Esti Pramuki, dan (7) Suami dan Ananda HP. Fauzan

Akbar Sinaga dan Sabrina Ridha Sari yang turut memberikan dorongan semangat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan laporan penelitian ini dengan mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif.

Medan, Maret 2001  
Ketua Peneliti,



Dra. Herawaty Damanik  
NIP. 131 787 137

Universitas Terbuka

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Teoritis.....	5
1. Masalah Kesenjangan Sosial.....	5
2. Konflik.....	8
3. Model Penyelesaian Suatu Konflik.....	12
B. Kerangka Berpikir.....	14
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	16
A. Tujuan Penelitian.....	16
B. Manfaat Penelitian.....	16
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	17
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
B. Operasionalisasi Variabel.....	18
C. Populasi dan Sampel.....	19
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	19
1. Wawancara Mendalam.....	20
2. Angket.....	21



3. Observasi .....	21
E. Teknik Analisis Data .....	22
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	23
A. Hasil Penelitian .....	23
1. Kelurahan Polonia – Kecamatan Medan Polonia .....	23
2. Kelurahan Tegal Sari I – Kecamatan Medan Area .....	35
3. Kelurahan Lalang – Kecamatan Medan Sunggal .....	43
B. Pembahasan .....	52
1. Keresasian Sosial .....	52
2. Bentuk Konflik .....	55
3. Faktor Penyebab Konflik .....	58
4. Model Penyelesaian Konflik .....	62
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	17
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Polonia.....	24
3. Jumlah Penduduk Kelurahan Polonia Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	25
4. Sarana Pendidikan di Kelurahan Polonia.....	29
5. Sarana Ibadah di Kelurahan Polonia.....	32
6. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Tegal Sari I.....	37
7. Jumlah Perkumpulan Sosial di Kelurahan Tegal Sari I .....	40
8. Jumlah Sarana Umum di Kelurahan Lalang .....	50

Universitas Terbuka

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.....	72
2. Izin Penelitian.....	75
3. Instrumen Penelitian.....	80
4. Daftar Informan.....	88
5. Peta Lokasi Penelitian.....	89

Universitas Terbuka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah dan pemukiman bagi manusia merupakan kebutuhan utama, selain sandang dan pangan. Pertambahan penduduk yang sangat cepat, terutama di kota-kota besar mengakibatkan kebutuhan perumahan semakin meningkat. Terbatasnya kemampuan dana pemerintah mengakibatkan pembangunan perumahan dan pemukiman tidak mampu berpacu seiring dengan pesatnya pertambahan penduduk. Membangun perumahan memerlukan modal yang cukup besar, apalagi jika hal itu sengaja dirangsang menjadi pemukiman. Pemukiman meliputi rumah dan segala fasilitas bagi penghuninya. Fasilitas tersebut meliputi persediaan air minum, penerangan, jaringan saluran pembuangan, jalan untuk transportasi, dan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya penting bagi fungsi pemeliharaan kesehatan lingkungan. (Widiyanti.S,1987, hlm. 274)

Kondisi pemukiman yang serasi, harmonis, asri, dan aman merupakan idaman setiap orang, meskipun penghuninya terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda seperti etnis, agama atau golongan. Menyadari bahwa perumahan dan pemukiman tidak akan pernah berhenti sebagai salah satu sumber masalah dalam kehidupan dapat dikatakan masalah perumahan tergolong masalah yang kompleks, karena menyangkut banyak aspek, seperti

keadaan sosial ekonomi masyarakat, planologi kota, masalah tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Tingkat keserasian sosial masyarakat penghuni suatu pemukiman tidaklah sama, sebab pada setiap daerah pemukiman penghuninya mempunyai latar belakang yang berbeda seperti asal usul atau sejarah pemukiman, struktur pemukiman, dan zona pemukiman yang berbeda. Di samping itu pada suatu daerah pemukiman yang masyarakatnya baru membentuk suatu komunitas, tentu tingkat integrasinya belum terwujud secara utuh. Menurut Zamroni (1988: hlm. 25) di dalam masyarakat tidak pernah ada wujud integrasi yang sempurna, senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan ini akan diseimbangkan melalui proses pelembagaan. Dapat dinyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, konflik dapat dikurangi atau dihapuskan. Pada umumnya konflik terjadi karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakstabilan keadaan di masyarakat yang diakibatkan adanya dinamika dan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat Indonesia yang cukup majemuk, kemungkinan terjadinya salah pengertian sangatlah terbuka diantara berbagai golongan yang dapat memicu terjadinya konflik. Terutama saat memasuki era reformasi seperti sekarang ini yang menghendaki adanya keterbukaan dan pengakuan terhadap hak-hak manusia yang selama ini diabaikan.

Fungsi keserasian sosial sangatlah penting bagi terciptanya masyarakat yang baik. Pemukiman yang baik kiranya dapat mewujudkan keserasian

sosial, agar masyarakat yang ada di dalamnya dapat mengembangkan sumber dayanya secara optimal, sehingga diperoleh kebahagiaan hidup lahir dan batin. Karena keserasian sosial sangat penting bagi masyarakat terutama di masa pembangunan ini, agar hal itu dapat terwujud, perlu diketahui potensi masalah dan konflik-konflik yang terjadi di suatu daerah lokasi pemukiman. Dengan mengetahui potensi konflik-konflik yang terjadi pada suatu lokasi pemukiman itu, kita dapat memberikan kontribusi penyelesaiannya dan mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya konflik yang lebih besar, sehingga akhirnya terwujud keserasian sosial di tengah-tengah masyarakat.

Memperhatikan betapa pentingnya keserasian sosial bagi masyarakat, khususnya di wilayah permukiman maka penulis tertarik untuk mengkaji keserasian sosial pada daerah pemukiman di Kodya Medan.

## **B. Perumusan Masalah**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini secara horizontal dapat terlihat dari berbagai kesatuan-kesatuan sosial atau perbedaan suku, agama, adat istiadat dan kebiasaan, dan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan stratifikasi sosial, bentuk interaksi sosial yang sering kali bersifat kompleks, sehingga peluang terjadinya benturan antarkelompok, gejolak sosial, dan polarisasi sosial cukup besar. Keadaan tersebut sedang teruji di era reformasi yang sedang berlangsung. Munculnya berbagai masalah sosial yang cukup banyak sebagaimana terlihat dalam berbagai berita di media massa, bahkan sebagian menjadi ulasan utama

pada beberapa koran, majalah, dan televisi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masalah keserasian sosial didalam masyarakat sedang mengalami ujian.

Tingkat keserasian sosial dalam suatu masyarakat tidak sama, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keberadaan dan kualitas masyarakat, latar belakang sosial dan budaya serta daerah atau lokasi pemukiman masyarakat itu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana tingkat keserasian sosial antar warga pada daerah pemukiman di Kodya Medan?
2. Bentuk-bentuk konflik apakah yang terjadi pada daerah pemukiman di Kodya Medan?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya ketidakserasian sosial/konflik pada daerah pemukiman tersebut?
4. Bagaimana model penyelesaian konflik pada daerah pemukiman tersebut?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Masalah Keresasian sosial

Istilah keresasian sosial tidak ditemukan secara khusus di dalam kepustakaan, namun istilah lain atau konsep lain dalam arti luas sudah banyak dibahas oleh para ahli, diantaranya adalah homeostetic, equilibrium, keseimbangan sosial (social equilibrium), solidaritas sosial, dan integrasi sosial.

Menurut Dahlan (1986) istilah “keresasian sosial” memang kurang lazim digunakan dalam ilmu sosial, dan banyak ahli melihatnya dengan konotasi ideologis, bukan ilmiah. Dalam sarasehan tahun 1985 untuk membahas konsep keresasian sosial, dinyatakan bahwa awalnya yang ditelaah ilmu sosial adalah “konflik”, bukan keresasian dan keselarasan dalam masyarakat. Sebenarnya konflik dan keresasian sosial tidak perlu dilihat secara terpisah, sebab menurut Dahlan (1986) keduanya merupakan sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Keduanya menyangkut status hubungan dan cara mengelola perbedaan antar- orang atau antar-kelompok, dalam masyarakat.

Perincian konsep keresasian sosial dapat dilacak dari berbagai jalinan variabel-variabel keresasian sosial, baik dari teori maupun hasil-hasil pengalaman empirik di lapangan. Menurut buku Panduan



Pelaksanaan Pengukuran Keserasian Sosial yang disusun atas kerja sama kelompok Program Studi Kependudukan-Lembaga Penelitian UNPAD Bandung dengan Kantor Menteri Negara KLH (1992), ada 4(empat) paradigma sosiologis yang dapat menerangkan terjadinya keserasian sosial, yaitu :

a. Teori Struktural Fungsional oleh Parson

Teori ini berasumsi bahwa keserasian sosial merupakan cerminan dari ketergantungan fungsional dari berbagai kelompok kecil, kolektivitas, dan kategori sosial yang semuanya memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan sistem sosial. Indikator yang digunakan adalah bagaimana saling ketergantungan hubungan antara berbagai kelompok sosial yang berbeda dalam membentuk kemantapan integrasi sosial.

b. Pendekatan Konflik yang dipelopori oleh Karl Marx

Pendekatan ini berasumsi bahwa di dalam masyarakat ada unsur kelas, dimana masing-masing kelas mempunyai perbedaan kepentingan yang semakin tajam dan mengarah kepada terjadinya eksploitasi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan kelas ini mengakibatkan terjadinya posisi super ordinat dengan segala macam konsekuensinya. Indikator yang dapat digunakan adalah: (1) tingkat kesadaran dari para pelaku, status dan peranan sosialnya terhadap penguasaan sumberdaya; (2) apa yang menjadi

dasar kepentingan dari pelaku; dan (3) apakah terjadi eksploitasi diantara kekuatan sosial yang ada.

c. Pendekatan Teori Pertukaran (exchange theory)

Teori ini berasumsi bahwa keserasian sosial di masyarakat dapat terwujud apabila terdapat suatu bentuk pertukaran yang saling memberi keuntungan yang seimbang serta ada rasa menerima terhadap nilai dan norma yang berlaku. Indikator yang bisa dilacak adalah: (1) saling memperoleh keuntungan; (2) pertukaran yang seimbang; (3) saling menerima sistem nilai dan norma.

d. Pendekatan Teori Interaksionalisme Simbolis

Pendekatan ini berasumsi bahwa keserasian sosial itu timbul bila ada pengertian, kesamaan pandangan, dan adanya mekanisme interpretasi. Indikator yang dapat dilacak dari teori ini adalah (1) saling pengertian secara sadar; (2) terwujudnya konsensus yang normatif; (3) adanya saling pengertian dalam menginterpretasikan definisi situasi.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa masalah keserasian sosial dalam arti kata yang luas, telah menjadi perhatian pemikir sejak lahirnya ilmu-ilmu sosial. Dari keempat pendekatan terjadinya keserasian sosial tersebut, peneliti akan menggunakan pendekatan teori interaksionalisme simbolis karena menurut pendekatan ini keserasian sosial sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi antarkelompok.

Masalah keserasian sosial perlu mendapat perhatian penuh dalam rangka melaksanakan proses pembangunan bangsa (nation building) dan pemantapan kesatuan bangsa. Di samping itu, proses pembangunan yang masih panjang memerlukan kesinambungan upaya dan tekad serta tingkat keserasian yang tinggi.

## 2. Konflik

Membicarakan masalah keserasian sosial tidak dapat dipisahkan dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf (1986:hlm. 256) kehidupan sosial itu menghasilkan konflik yang berstruktur. Berdasarkan pertimbangan nilai, masih kuatnya pilihan terhadap konsep mengenai masyarakat yang mengakui pertentangan sosial sebagai suatu gambaran yang esensial dari struktur dan proses sosial. Di samping itu masih terdapat preferensi yang sangat kuat terhadap pendirian bahwa pertentangan sosial itu, jika tidak dapat dianggap “fungsional”, mempunyai akibat-akibat yang sangat penting terhadap proses sosial. Pertentangan sosial berdasarkan model penggunaan kekuasaan, mempunyai dua wajah, yakni pertama memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial, dan kedua mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Dengan demikian berarti konflik atau pertentangan sosial selalu terjadi dalam suatu struktur atau sistem tertentu.

Secara umum dapat dilihat terjadinya konflik antara lapisan atas dan lapisan bawah, karena adanya kepentingan yang berbeda. Walaupun

konflik selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, tetapi Soekanto (1990, hlm. 179) menegaskan bahwa tercapainya keadaan stabil sedikit banyak juga tergantung pada faktor kepemimpinan dan ideologi yang dengan berubahnya struktur masyarakat, mungkin juga mengalami perubahan-perubahan.

Konflik dalam kelompok masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan. Penghapusan atau pengurangan konflik tersebut dimaksudkan dapat menciptakan kondisi kehidupan yang serasi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai kehidupan sosial yang baik seperti yang dicita-citakan, dilaksanakan pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan suatu perubahan besar yang direncanakan meliputi seluruh aspek dan melibatkan semua orang serta kelompok.

Dalam perkembangannya proses pembangunan itu sendiri membawa berbagai perkembangan yang perlu diatasi, karena pengaruh pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup tidak sama atau berbeda-beda. Dampak pembangunan ada yang maju jauh lebih cepat dari yang dirasakan yang lain, tetapi ada pula yang merasakan perubahan yang tidak menguntungkan.

Mengingat bahwa kegiatan pembangunan merupakan aktivitas manusia tanpa akhir, maka keserasian sosial yang merupakan unsur penting bagi terciptanya kegiatan pembangunan yang berkesinambungan perlu mendapat perhatian yang seksama. Di samping itu keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk sangat rentan terhadap munculnya

konflik atau ketidakserasian. Salim (Kompas, ed.16.02.2000, hlm. 4) menyatakan bahwa dalam suatu dasawarsa terakhir terjadi konflik sosial yang disertai tindak kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah, pembakaran pertokoan, pembakaran tempat ibadah, serta perkosaan. Selanjutnya ia menyatakan intensitas dan ekstensitas konflik sosial sekarang berpotensi kian meningkat, terutama konflik sosial yang bersifat horizontal. Hal ini dapat disimak dalam konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di Maluku, Pontianak, Palangkaraya dan Sampit setelah sebelumnya juga terjadi kekerasan seperti kasus pertengahan Mei 1998 yaitu kasus Ketapang dan lain-lain. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara hidup, kebiasaan, adat istiadat, sistem kepercayaan atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri dapat mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam suatu wadah masyarakat Indonesia di bawah naungan sistem nasional dan kebudayaan nasional Indonesia.

Corak kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi lebih rumit karena adanya sejumlah warga negara yang tergolong sebagai keturunan orang asing yang hidup di dalam dan menjadi bagian masyarakat Indonesia, yang walaupun kecil jumlahnya tetapi penting perannya ekonominya. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Suparlan (ed. 1989)

tentang pola-pola interaksi antaretnik di Indonesia: suatu studi kasus di Kalimantan Barat.

Dalam kaitan ini Parson (dalam Lawang, 1986), menyatakan integrasi sosial (baca:Keserasian sosial) merupakan salah satu dari empat "prasyarat fungsional" suatu sistem sosial. Sedangkan Sorokin menyatakan bahwa hanya masyarakat yang berintegrasi penuh saja yang akan mampu tumbuh dan membangun terus dari dalam. Sedangkan yang belum terintegrasi, pertumbuhan dan pembangunan akan tersendat-sendat dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dengan demikian dalam suatu kehidupan sosial, masalah konflik selalu ada.

Timbulnya konflik sebagai dampak dari pembangunan yang sedang berlangsung, juga disebabkan karena pembangunan yang ada lebih menekankan pada pembangunan fisik, selain itu sistem kebijakan yang tidak menciptakan keadilan dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua warga masyarakat ikut serta menikmati hasil pembangunan. Walaupun kebijakan pemerintah telah menetapkan adanya delapan jalur pemerataan, tetapi kemajemukan masyarakat Indonesia dan tingkat sosial ekonomi serta kondisi geografis dan demografis yang sedemikian rupa, telah menyebabkan muncul konflik-konflik dalam masyarakat terutama di era reformasi ini. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dipahami kondisi sosial masyarakat Indonesia khususnya kota Medan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dan juga diharapkan dapat ditemukan upaya meminimalkan

kemungkinan terjadinya berbagai bentuk ketidakserasian di pemukiman kota, khususnya kota Medan, karena makna sejahtera juga mencakup kehidupan yang aman, damai, dan jauh dari pertentangan.

### 3. Model Penyelesaian Suatu Konflik

Adanya konflik pada masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan dengan cara menyelesaikan adanya pertentangan tersebut.

Dahrendorf (1986: hlm. 280) menyatakan untuk menyelesaikan pertentangan perlu memperhatikan peraturannya. Yang dimaksud peraturan di sini, sama dengan bentuk-bentuk pengendalian pertentangan yang lebih menunjukkan dirinya sendiri kepada perwujudan pertentangan daripada sebab-sebabnya, dan yang secara tersirat menyatakan, terus menerus adanya antagonisme kepentingan dan kelompok-kelompok kepentingan. Dahrendorf menyatakan peraturan pertentangan yang efektif mensyaratkan adanya paling sedikit tiga faktor yang secara sendiri-sendiri mempengaruhi tingkat kekerasan perwujudan pertentangan. *Pertama*, untuk memungkinkan efektifnya peraturan pertentangan ; dengan cara adanya pengakuan dan perhatian terhadap perbedaan serta organisasi kelompok-kelompok kepentingan yang bersatu. Dalam hal ini selama kekuatan yang bertentangan itu terpecah-pecah dalam kesatuan-kesatuan kecil, peraturan pertentangan tidak mungkin efektif. *Kedua*, kelompok yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan dan dalam hal ini harus mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan.

Pengakuan adilnya maksud lawan di sini berarti kedua kelompok yang bertentangan menerima untuk apa pertentangan itu, yakni menerimanya sebagai suatu hasil pertumbuhan yang tak terelakkan dari struktur. *Ketiga*, untuk memungkinkan efektifnya peraturan pertentangan, kelompok-kelompok yang berlawanan dalam pertentangan sosial harus menyetujui “aturan permainan formal” tertentu yang menyediakan kerangka antar-hubungan bagi mereka. Yang dimaksud dengan aturan permainan di sini adalah seperti norma-norma prosedur yang mengikat kontestan yang bertentangan tanpa memprakarsai hasil dari pertentangan mereka. Tetapi aturan permainan itu hanya akan berfungsi mengatur, jika dan selama aturan itu menempatkan kedua kelompok pada pijakan yang sama.

Berikut ini dikemukakan bentuk-bentuk peraturan pertentangan yang sangat abstrak, yang memerlukan perluasan dan modifikasi sesuai dengan keadaan masyarakat, dimana terlihat adanya peran kelompok ketiga dalam peraturan pertentangan.

Tipe	Mengundang nasihat kelompok ketiga	Menerima nasihat kelompok ketiga	Istilah Kerr
A	Tidak	Tidak	Konsiliasi
B	Fakultatif	Fakultatif	Mediasi
C	Fakultatif	Wajib	Arbitrasi (Penindasan)
D	Wajib	Fakultatif	
E	Wajib	Wajib	

(Dahrendorf, 1986 : hlm. 283)

Ketiga bentuk peraturan pertentangan tersebut yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi dapat dilaksanakan sebagai peraturan pertentangan



secara berurutan atau dapat pula diterapkan secara terpisah-pisah menurut situasi tertentu.

## **B. Kerangka Berfikir**

Menurut pendapat para ahli, antara lain Dahrendorf (1986), Zamroni (1988), Lewis Coser (dalam Garna, 1992) dalam kehidupan sosial, konflik itu selalu dan berlangsung sebagai suatu dinamika dan perubahan dalam masyarakat itu sendiri.

Secara tegas Coser mengemukakan bahwa konflik itu mencegah suatu pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya tekanan inovasi dan kreativitas. Selanjutnya ia menyatakan bahwa konflik yang bersifat antar maupun dalam kelompok selalu berwujud dalam kehidupan sosial. Karena itu konflik disebut sebagai unsur interaksi yang penting, yang sama sekali tak boleh disimpulkan bahwa konflik selalu tidak baik, memecah belah atau merusak.

Pada hakikatnya pertentangan dapat membantu menghilangkan unsur-unsur yang memisahkan dalam suatu antarhubungan sosial dan untuk membangun persatuan kembali. Sejauh pertentangan itu menyelesaikan ketegangan antara pihak-pihak yang bertentangan, ia menstabilkan dan menjadi suatu komponen yang menyatukan antar hubungan sosial. Dengan demikian bagi Coser, konflik yang menyangkut relasi-relasi pertentangan yang objektif dan struktural justru dapat menyumbang menuju arah kelestarian kelompok dan mempererat relasi antarkelompok tersebut.

Sementara itu Kusnadi, antropolog Universitas Jember (Kompas, ed.04-03-2001,hlm.29) dalam uraian menanggapi “Peristiwa Sampit” mengemukakan bahwa konflik-konflik sosial yang terjadi justru merupakan perangkat untuk menciptakan integrasi sosial, dan dalam proses sosial dan budaya, ini harus dilihat sebagai bagian perjalanan integrasi sosial. Apabila konflik telah mengarah kepada desintegrasi sosial maka konflik dapat dikurangi bahkan dihapuskan, oleh karena itu konflik harus dikelola dengan baik.

Menurut pendekatan teori interaksionalisme simbolis, keserasian sosial timbul apabila ada pengertian, kesamaan pandangan, dan adanya mekanisme interpretasi. Ketiga aspek ini perlu mendapat perhatian dalam upaya menyelesaikan konflik sosial yang muncul agar keserasian sosial dapat terwujud ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk seperti tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, munculnya konflik sosial akhir-akhir ini menunjukkan adanya ancaman terhadap integrasi sosial yang dikhawatirkan dapat merobohkan eksistensi negara-bangsa. Oleh karena itu munculnya konflik dalam kehidupan sosial yang merupakan suatu proses perubahan masyarakat harus dapat dikelola sedemikian rupa agar konflik dapat benar-benar berfungsi menstabilkan dan menciptakan kondisi kehidupan serasi ditengah-tengah masyarakat. Dan kita harus mewaspadaai munculnya konflik yang dapat mengancam integrasi sosial bangsa kita, karena hanya masyarakat yang berintegrasi penuh saja yang akan mampu tumbuh dan membangun dirinya.

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### A. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat keserasian sosial pada daerah pemukiman di Kodya Medan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik yang terjadi pada daerah pemukiman di Kodya Medan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakserasian sosial/konflik pada suatu daerah pemukiman.
4. Untuk mengetahui model penyelesaian suatu konflik pada daerah pemukiman.

#### B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menciptakan keserasian sosial pada daerah pemukiman di Kodya Medan selain itu diharapkan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah keserasian sosial di daerah perkotaan dalam upaya menunjang integrasi nasional.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei dan bersifat deskriptif, yang ditujukan untuk memperoleh gambaran tentang fenomena keserasian sosial di daerah pemukiman. Untuk memahami tingkat keserasian sosial dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian dilakukan di 3 (tiga) daerah pemukiman di Kodya Medan, yaitu: Kelurahan Tegal Sari-kec. Medan Area, Kelurahan Lalang-Kec. Medan Sunggal dan Kelurahan Polonia-Kec. Medan Polonia.

Ditetapkannya ketiga daerah pemukiman ini sebagai lokasi penelitian berdasarkan studi awal dengan data skunder tahun 1998 yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Kodya Medan, dimana di ketiga daerah pemukiman tersebut masyarakatnya cukup heterogen. Salah satu indikatornya dapat terlihat dari komposisi penganut agama, yaitu di kelurahan Polonia Kec. Medan Polonia, Kec. Sunggal dan Kec. Medan Area seperti tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Lokasi Agama	Kel. Polonia Kec. Mdn Polonia	Kel. Lalang Kec. Mdn Sunggal	Kel. Tegal Sari I Kec. Mdn Area
1. Islam	7847 orang	5839 orang	4343 orang
2. Kristen	2660 orang	1610 orang	439 orang
3. Katholik	612 orang	192 orang	1300 orang
4. Hindu	933 orang	109 orang	120 orang
5. Budha	3619 orang	4102 orang	3432 orang
Jumlah	15671 orang	11852 orang	9634 orang

sumber: Badan Pusat Statistik Kotamadya Medan. 1998.

Berdasarkan Surat Penjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pusat Studi Indonesia No: 4666/J31.2.3/PG/2000 tanggal 29 Mei 2000, waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian ini seyogyanya 8 bulan, tetapi adanya kendala di lapangan saat pengumpulan data, menyebabkan peneliti perlu mengajukan perpanjangan waktu dan atas izin PSI-UT, penelitian diperpanjang menjadi 10 bulan.

## **B. Operasionalisasi Variabel**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan untuk memudahkan pemahaman terhadap fokus penelitian dikemukakan batasan operasional variabel sebagai berikut:

- a. Keserasian sosial adalah bentuk atau pola kebersamaan hidup (togetherness) dalam suatu masyarakat majemuk yang didalamnya terdapat rasa saling mengerti, komunikatif, terbuka, dan dinamis.
- b. Konflik antarkelompok; adalah benturan antarkelompok baik sifatnya laten (tersembunyi) atau manifes (terbuka). Adapun bentuk-bentuk yang tersembunyi seperti curiga, prasangka negatif, kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Sedangkan yang sifatnya terbuka antara lain perkelahian atau bentrokan fisik lainnya.
- c. Pemukiman, dimaksudkan sebagai lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh warga masyarakat yang cukup heterogen dilihat dari aspek etnis, tingkat sosial ekonomi, agama, dan lain sebagainya.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi sasaran penelitian ini adalah warga masyarakat yang berada di 3 (tiga) lokasi pemukiman, yaitu Kelurahan Tegal Sari-kecamatan Medan Area, Kelurahan Lalang-kecamatan Medan Sunggal, dan Kelurahan Polonia-kecamatan Medan Polonia. Pemilihan lokasi berdasarkan pada keragaman warga masyarakat dengan alasan masyarakat yang bermukim di ketiga lokasi tersebut cukup heterogen dalam aspek etnis, tingkat sosial ekonomi, dan agama.

Sampel penelitian ini adalah kepala rumah tangga yang terpilih yang berasal dari berbagai lapisan sosial ekonomi dan terdiri dari berbagai macam profesi, serta tokoh masyarakat. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan tehnik snowball sampling.

### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan instansi terkait, guna memperoleh data-data tentang sebaran penduduk berdasarkan status sosial ekonomi masyarakat di lokasi penelitian.

Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan angket dan wawancara mendalam. Kuesioner disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang dikembangkan dari operasionalisasi variabel diatas. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi kualitatif tentang dinamika masyarakat yang memperlihatkan adanya keserasian sosial antarwarga, serta

bentuk-bentuk konflik yang pernah terjadi, meliputi: masalah yang dapat menimbulkan konflik bagi masyarakat, konflik yang pernah terjadi di masa lalu, bentuk-bentuk penyelesaian konflik serta bagaimana pengelolaan keserasian dan menanggulangi konflik.

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, pada saat pengumpulan data melalui penyebaran angket dan wawancara peneliti sekaligus melakukan observasi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara riil dinamika kehidupan sosial masyarakat untuk mengetahui tingkat keserasian sosial di pemukiman tersebut.

### **1. Wawancara Mendalam**

Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih dahulu melapor ke Kantor Kelurahan setelah mendapat surat pengantar dari Kantor Kecamatan. Pada saat melapor dan bertemu dengan Lurah, peneliti memanfaatkan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terutama yang berkaitan dengan masalah keserasian sosial di daerah masing-masing kelurahan. Informasi yang diberikan oleh Lurah tersebut dijadikan sebagai informasi awal untuk menelusuri masalah selanjutnya. Sebagai informan berikutnya adalah orang yang dianggap tokoh di dalam masyarakat yang kiranya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk diwawancarai, yaitu mereka yang diharapkan dapat memberikan pendapat, perasaan, tanggapan atas beberapa aspek keserasian sosial.

Informan yang diwawancarai sebagai tokoh masyarakat tersebut berasal dari berbagai lapisan sosial ekonomi dan terdiri dari berbagai macam

profesi, seperti : aparat kelurahan (Lurah dan Kepala Lingkungan), pegawai, dokter, guru, pedagang, pemuka agama, ibu rumah tangga, dan pemuda. Dalam pelaksanaan wawancara mendalam peneliti tidak menggunakan alat perekam, agar wawancara berlangsung secara alamiah dalam suasana santai. Pedoman wawancara hanya digunakan bila peneliti ingin mengecek lebih jauh data yang masih dirasakan kurang. Peneliti menggunakan sistem buku harian untuk mencatat hasil wawancara yang berlangsung antara setengah jam hingga satu jam untuk setiap informan.

## **2. Angket**

Angket penelitian ditujukan kepada responden dari sampel yang terpilih dengan menggunakan teknik snowball sampling, dimana responden pertama dihunjuk berdasarkan masukan dari aparat kelurahan, sedangkan responden berikutnya ditetapkan berdasarkan masukan dari responden sebelumnya. Tiap kelurahan terdiri dari 10-12 lingkungan, karena itu dalam pengambilan data melalui angket ini, diupayakan para responden yang dihunjuk tersebut dapat mewakili masing-masing lingkungan. Dari ketiga daerah pemukiman yang menjadi lokasi penelitian ini, responden yang menjadi sumber data berkisar antara 15-20 orang dari tiap-tiap lokasi.

## **3. Observasi**

Observasi dilakukan untuk melihat secara riil kehidupan masyarakat di lokasi penelitian seperti: hubungan dan komunikasi antar warga, sifat keterbukaan warga, rasa kebersamaan, rasa curiga, kegiatan organisasi pemuda dan masyarakat, penataan lingkungan, bekas-bekas peristiwa konflik



masa lalu, dan sebagainya. Hal itu perlu dicermati untuk mengetahui gambaran tingkat keserasian sosial di pemukiman tersebut. Observasi dilakukan bersamaan pada saat peneliti ke lokasi untuk melakukan wawancara dan penyebaran angket. Peneliti menggunakan pedoman observasi dalam mengadakan pengamatan ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data penelitian yang bersifat kuantitatif akan dianalisis dengan statistika deskriptif, untuk melihat kecenderungan data. Sedangkan data yang bersifat kualitatif akan dianalisis secara kualitatif dan digambarkan sesuai dengan hasil analisis dengan menggunakan metode interpretatif.

Langkah-langkah utama yang akan ditempuh dalam menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data diklasifikasi sesuai dengan lokasi penelitian (tiga daerah pemukiman).
2. Masalah-masalah sosial/konflik yang muncul di masing-masing daerah pemukiman digolongkan sesuai dengan masalah sosial yang dihadapi masyarakat, yaitu masalah kemiskinan (ekonomi), kejahatan, disorganisasi keluarga, generasi muda, moral, agama, kependudukan, dan lingkungan hidup.
3. Dari penggolongan masalah pada butir 2, diketahui konflik-konflik apa yang terjadi di tiga lokasi pemukiman, apakah ada perbedaan konflik di tiga lokasi pemukiman tersebut.
4. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan kesesuaian data dengan kecenderungan temuan penelitian.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kelurahan Polonia - Kecamatan Medan Polonia

Kelurahan Polonia merupakan suatu wilayah pemukiman dengan penduduk yang heterogen. Dari keadaan ini terlihat bahwa etnis Jawa merupakan penduduk mayoritas jika dibandingkan dengan penduduk lainnya, seperti : Minangkabau, Batak Toba, Tamil (India), Cina, Batak Karo dan Melayu.

Ditinjau dari sudut sejarah, penduduk di daerah ini telah cukup lama menetap dalam satu komunitas bersama. Pada umumnya mereka telah menetap sejak 20 - 50 tahun yang lalu, sehingga melalui proses yang cukup panjang mereka telah berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Sebelum menetap di daerah ini, mereka ada yang berasal dari daerah luar kota Medan maupun dari daerah Pulau Sumatera yaitu Pulau Jawa.

Daerah asal kedatangan mereka ke daerah ini, pada dasarnya dapat dikategorikan atas dua faktor yaitu: faktor ekonomi dan faktor pekerjaan. Penyebaran penduduk di kelurahan Polonia berdasarkan lingkungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel II: Jumlah Penduduk Kel.Polonia**

No	LINGKUNGAN	WNI		WNA		JUMLAH	KK
		Lk	Pr	Lk	Pr		
1	I	654	846	-	1	1501	270
2	II	631	780	20	19	1450	297
3	III	965	974	-	1	1940	391
4	IV	973	452	5	4	1434	309
5	V	850	275	1	-	1126	256
6	VI	733	896	27	21	1677	354
7	VII	621	505	5	9	1137	184
8	VIII	461	514	5	-	980	173
9	IX	251	527	6	5	789	238
10	X	432	440	5	6	883	333
11	XI	780	796	2	2	1580	294
12	XII	390	781	-	3	1174	334
<b>JUMLAH</b>		<b>7741</b>	<b>7786</b>	<b>76</b>	<b>71</b>	<b>15.671</b>	<b>3433</b>

Sumber : kelurahan Polonia Medan

Faktor Ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk bermigrasi didaerah ini dengan satu harapan akan dapat merubah nasib yang selama ini dianggap belum memadai. Sedang faktor pekerjaan merupakan alasan lainnya, dimana hal ini berlaku pada umumnya bagi penduduk yang bekerja di sektor militer dan oleh karena jabatan maupun ketentuan dari atasan harus pindah tugas. Sementara daerah tujuan adalah Kelurahan Polonia, berhubung didaerah ini terdapat asrama TNI - AD dan pangkalan Angkatan Udara yang sekaligus asrama untuk TNI - AU.

Sedangkan data penduduk dilihat dari segi pekerjaan seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel III: Jumlah Penduduk Kel. Polonia Berdasar Jenis Pekerjaan**

No.	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	306
2	ABRI	19
3	Peg. Swasta	3715
4	Pedagang	1349
5	Buruh	11
6	Tukang	78
7	Pensiunan	189
<b>Jumlah</b>		<b>5667</b>

Sumber: Kelurahan Polonia, Medan.

Alasan penduduk memilih untuk tinggal didaerah ini dilatabelakangi karena dekat dengan tempat bekerja (35%), sementara 30% menyatakan alasan karena tempat ini dianggap aman. Persentase yang cukup kecil (15%) memberi alasan agar dekat dengan teman sekampung serta karena merupakan daerah tempat kelahiran (20%). Akibat adanya keanekaragaman etnis dengan proses dan alasan yang berbeda menyebabkan terbentuknya pola menetap yang membaur, tidak diketemukan penumpukan suatu etnis tertentu dalam satu daerah/wilayah. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh di lapangan, sebanyak 100% responden menyatakan bahwa mereka memiliki jiran tetangga dari suku yang berbeda. Dari wawancara yang dilakukan juga diketahui bahwa warga Polonia tidak menolak bila berjiran tetangga dengan etnis yang berbeda.

Dengan demikian, dinamika kehidupan sebagai suatu komunitas yang dinamis akan terwujud dengan adanya interaksi yang terjadi akibat adanya

jalinan tali silaturahmi yang baik. Hal ini dapat di tandai dengan adanya rasa keakraban bagi sesama penduduk, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal lainnya.

Fenomena ini dapat terbentuk dari adanya prinsip hidup yang berlaku yaitu "tetangga merupakan keluarga yang terdekat" jika dibandingkan dengan kerabat lainnya yang berjauhan tempat tinggalnya.

Prinsip hidup ini tetap dipertahankan dan diterapkan sebagai sesama warga kelurahan Polonia, setidaknya dalam hal memintabantuan dengan jiran tetangga. Adapun bentuk bantuan yang pernah diberikan para tetangga berupa bantuan tenaga (85%) yakni jika sesuatu saat melakukan hajatan yang memerlukan bantuan tenaga orang lain, disimilah tetangga, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak memberikan bantuan. Sebesar 10% menyatakan akan meminta bantuan dari ziran tetangga untuk menjaga rumah. Hal ini biasanya dilakukan pada saat mengadakan acara pulang kampung, misalnya menyambut Hari Raya dan acara adat lainnya. Persentase yang paling kecil sebesar 5% meminta bantuan dalam bentuk uang.

Kecilnya persentase ini memperlihatkan bahwa masalah uang masih merupakan hal yang sangat tabu untuk diketahui orang lain termasuk pihak tetangga serta sangat riskan untuk dibicarakan. Keadaan ini tetap akan terlaksana jika benar-benar sangat mendesak untuk dibicarakan dan dituntaskan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa jika kesulitan keuangan umumnya warga lebih baik meminjam ke Koperasi atau dengan upaya lain asal tidak melalui tetangga.

Fenomena demikian juga terlihat bagaimana para responden setidaknya tidak pernah dimintai bantuannya oleh tetangga. Sebagian besar (95%) menyatakan pernah dimintai bantuan. Bentuk bantuan yang mereka berikan pada pihak tetangga berupa tenaga (70%) yakni saat-saat jiran tetangga memerlukan bantuan kala ada acara dilaksanakan. Kemudian bentuk uang (20%) yang dilakukan jika sangat mendesak dalam arti hal ini akan dilakukan sebagai solusi terakhir saja. Sebagian kecil (10%) menyatakan akan meminta bantuan kepada tetangga berupa uang dan tenaga.

Dari gambaran di atas terlihat bagaimana sesama warga di Kelurahan Polonia ini walau berbeda suku, agama dan tingkat sosial akan tetapi tetap membina hubungan interaksi yang langgeng dan saling memberi bantuan secara timbal balik (*reciprocity*). Sikap seperti ini yang mengutamakan asas kerjasama (*cooperatif*) disamping mempererat rasa kebersamaan juga dapat menjauhkan masyarakat dari konflik.

Umumnya masyarakat mengakui bahwa jarang ditemukan adanya konflik yang terjadi dengan sesama tetangga. Hal itu disamping masing-masing disibukkan dengan pekerjaan juga karena adanya rasa keterbukaan.

Dalam hal sikap keterbukaan terdapat perbedaan di kalangan etnis tertentu. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kecenderungan untuk memisahkan diri (*segregatif*) tampak di kalangan etnis Cina yang sebahagian besar hidup berkelompok dan sebahagian bermukim di sekitar jalan Pekong. Mereka sangat berhati-hati dalam bergaul, baik dalam bertutur sapa terutama dengan orang yang tidak dikenal dengan baik. Pada umumnya

mereka lebih memilih berkomunikasi melalui telepon daripada berkumpul dengan jiran tetangga. Tampaknya hal ini menunjukkan mereka tidak mempunyai waktu karena kesibukan yang menyita waktu dan juga menggambarkan adanya sikap membatasi diri dengan berusaha menghindari pembicaraan yang tidak berguna untuk menghindari terjadinya konflik, baik sesama jiran tetangga maupun etnis lainnya.

Berbeda dengan etnis tamil, mereka beradaptasi dan berinteraksi dengan baik dengan suku lainnya, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam kegiatan formal lainnya.

Sebagai sebuah keluarga yang berinteraksi dengan keluarga lain dalam suatu wadah yaitu masyarakat Kelurahan Polonia, dapat menimbulkan berbagai problem sosial. Untuk terhindar dari masalah tersebut, dibutuhkan kehadiran sebuah keluarga batih yang terdiri dari orang tua dan anak-anak yang hidup harmonis. Keadaan ini dapat tercipta jika dalam proses sosialisasi anak, orang tua megarapkan agar anak-anak mereka sebagai generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang dapat diharapkan oleh keluarga, masyarakat dan bangsa.

Oleh karenanya, selaku orang tua perlu untuk mendorong pergaulan anak-anak kearah yang positif. Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang berkesinambungan, dan harapan itu kelihatannya dapat terwujud dengan baik karena pada umumnya anak-anak mereka dalam bergaul sebatas dengan teman sekampung (85%), sementara yang lain (10%) menyatakan anak-anak

mereka bergaul dengan teman satu sekolah. Pola yang demikian merupakan suatu kemudahan bagi para orang tua untuk mengontrol diri si anak.

Aktivitas ini biasanya dilakukan anak-anak setelah pulang sekolah atau selepas pulan gkerja bagi yang telah bekerja.

**Tabel IV: Sarana Pendidikan Di Kelurahan Polonia**

No	TEMPAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD Negeri	4
2	SD Swasta	4
3	SLTP Swasta	2
4	SMU Swasta	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber: Kelurahan Polonia, Medan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan cukup bervariasi, khusus bagi anak seusia sampai tingkatan sekolah dasar, melakukan pola permainan petak umpet, masak-masakan. Sementara bagi anak-anak yang telah dewasa ikut aktif dalam organisasi sosial yang ada terbentuk didaerah ini seperti dalam organisasi kepemudaan PP (Pemuda Pancasila), IPK (Ikatan Pemuda Karya), AMPI (Angkatan Muda Pemabruan Indonesia), FKPPI (Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan ABRI), Karang Taruna dan BBA (Bina Bakat Abadi). Disamping itu ikut terlibat sebagai anggota atau pengurus di organisasi Politik, seperti PDI (Partai Demokrasi Indonesia), PDI - P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Dalam pergaulan dengan teman sekampung ini, para anak muda berupaya menyalurkan bakatnya khususnya dalam bidang olah raga seperti Bola Kaki, Volley mau pun ikut aktif dalam



organisasi keagamaan seperti : Remaja Masjid bagi yang beragama Islam dan Persekutuan Doa bagi kaum Nasrani.

Para orang tua ikut terlibat langsung sebagai anggota maupun pengurus didalam organisasi STM (Serikat Tolong Menolong). Sebesar 70% responden mengakui ikut sebagai anggota STM sedangkan sebesar 30% mengaku tidak ikut sebagai anggota STM karena mereka berstatus penduduk tidak menetap yang sewaktu-waktu akan berpindah tempat tinggal.

Dalam rangka menciptakan keserasian sosial yang harmonis dan langgeng antara sesama penduduk yang memiliki latar belakang budaya, agama yang berbeda, masing-masing penduduk berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Salah satu bentuk nyata yang dilakukan ke arah itu adalah pada saat adanya hajatan yang akan dilakukan oleh seorang warga dengan mengundang jiran tetangga. Pada umumnya (100%) dari reponden menyatakan akan menghadiri acara tersebut walaupun undangan tersebut datangnya dari tetangga yang berbeda agama dan etnis. Hal ini dilakukan karena telah merasa sebagai satu keluarga, hanya saja perlu dicermati bahwa kegiatan tersebut sepanjang tidak bertentang dengan agama yang dianut.

Sikap ini juga tidak terlepas dari adanya pengakuan responden (100%) yang mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak terhalang untuk bergaul dengan warga, jiran tetangga yang berbeda etnis maupun agamanya. Untuk itulah, jika berketepatan datangnya Hari Raya, tahun baru maupun Imlek, mereka akan mengunjungi (85%) dan sebesar 15% menyatakan bahwa

mereka akan mengadakan kunjungan dalam rangka Hari Raya, Tahun Baru atau memberi sumbangan jika ada yang ditimpa musibah.

Adanya rasa toleransi yang cukup tinggi ini menyebabkan di dalam masyarakat tidak ada rasa curiga, berprasangka negatif terhadap sesama penduduk walaupun diakui masih ada segelintir anggota masyarakat yang memiliki sifat cemburu. Kecemburuan sosial ini relatif kecil persentasenya, hal itu tercipta karena adanya ketimpangan dalam bidang ekonomi, meskipun demikian hal ini tidak menimbulkan gejolak sosial yang mengarah pada terciptanya konflik.

Secara ekonomi, sebagaimana yang dituturkan oleh Lurah Polonia, sebanyak 40 % penduduk di daerahnya berada pada level bawah. Hal ini ditandai dengan adanya sebanyak 720 KK termasuk dalam kategori Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera 1 (KS 1)

Wujud lain dalam mengupayakan terciptanya keserasian sosial yang kondusif adalah munculnya sikap warga (100%) untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengupayakan meningkatkan keamanan dan bersih lingkungan. Hal itu dilakukan melalui gotong royong membersihkan parit dan jalan di hari Minggu maupun Jum'at. Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) dilaksanakan warga di tiap-tiap lingkungan setiap malam secara bergiliran dari pukul 23.00 - 05.00 WIB yang melibatkan seluruh warga turut aktif berpartisipasi, baik dari golongan muda maupun golongan tua dan biasanya juga diikuti kelompok Remaja Masjid dan Organisasi Kepemudaan. Kegiatan sosial lainnya adalah adanya Serikat Tolong Menolong (STM) yang terbentuk

didasarkan pada agama, dan umumnya bergerak dibidang upacara kematian saja.

Peranan kaum ibu didaerah ini tergolong cukup aktif untuk menjalin persahabatan melalui program arisan lingkungan yang dilakukan sebulan sekali yang melibatkan ibu-ibu dari berbagai elemen. Dalam bidang keagamaan, kaum ibu yang beragama Islam membentuk pengajian yang pelaksanaannya dilakukan seminggu sekali dihari Jumat. Ibu-ibu dari agama Nasrani membentuk perkumpulan doa safaat atau partangiangan yang secara rutin duilakukan seminggu sekali dirumah anggota masing-masing. Sedangkan bagi yang beragama Budha, Hindu pada umumnya mereka melakukan sembahyang di kuil dan Vihara masing-masing pada hari tertentu. Data tentang jumlah saran ibadah oleh masing-masing agama di kelurahan Polonia sebagai berikut:

**Tabel V: Sarana Ibadah Di Kelurahan Polonia**

No	RUMAH IBADAH	JUMLAH
1	Mesjid	5 buah
2	Musholla	2 buah
3	Gereja	6 buah
4	Pura	1 buah
5	Vihara	10 buah
<b>Jumlah</b>		<b>24 buah</b>

Sumber: Kelurahan Polonia, Medan.

Walaupun demikian, pada umumnya diakui responden (100%) mengakui pernah terjadi konflik di didaerah ini yang sifatnya telah menjurus ke arah negatif. Bentuk konflik yang terjadi pada dasarnya bukan disebabkan adanya benturan budaya maupun agama yang dapat memicu terjadinya SARA (Suktu

Agama Ras dan Antargolongan), tetapi disebabkan faktor diluar keheterogenan penduduk.

Kelurahan Polonia merupakan suatu wilayah pemukiman penduduk yang cukup aman untuk dihuni, sehingga hal ini merupakan faktor pendorong datangnya pendatang untuk bertempat tinggal. Akan tetapi disekitar tahun 1993-1995 muncul masalah yang cukup mengganggu ketenteraman hidup masyarakat setempat yakni seringnya terjadi konflik yang berkepanjangan. Menurut responden (75%) menyatakan konflik yang terjadi adalah antar OKP seperti: Pemuda Pancasila (PP) dengan Ikatan Pemuda karya (IPK) sedangkan sebagian lagi (25%) menyatakan konflik yang terjadi adalah perang antara anak muda.

Ditinjau dari penyebabnya terjadinya konflik antar OKP ini, pada umumnya adalah masalah perebutan lahan (90%), baik lahan perparkiran maupun petugas keamanan yang hasil dari lahan itu cukup untuk menghidupi organisasi tersebut. Penyebab lain (10%) terjadinya konflik adalah masalah anak muda, seperti ejek-ejekan maupun salah paham.

Akibat yang ditimbulkannya dari konflik ini adalah kerugian bagi masyarakat, selain rumah sebagian penduduk rusak akibat terkena lemparan benda-benda keras, beberapa barang-barang dari rumah dijarah. Selain jatuhnya korban jiwa tetapi juga terjadi intimidasi terhadap warga.

Besarnya dampak buruk yang ditimbulkan dari perkelahian ini, disebabkan para pelaku pertikaian mempergunakan senjata tajam bahkan ada yang mempergunakan “ panah beracun “. Benda ini termasuk senjata yang

berbahay, terbuat dari besi yang ujungnya bergerigi dan tajam seryta dilumuri sejenis cairan yang mengandung racun. Bentuk pertikaian seperti ini ditiru didaerah lain dalam wilayah Kotamadya Medan, termasuk dalam menggunakan benda-benda itu. Sejak terjadinya konflik ini daerah kawasan Polonia... menyebabkan daerah itu cukup menakutkan karena seringnya terdengar korban akibat panah beracun.

Disamping konflik tersebut, terjadi juga konflik antar partai politik, yakni PDI-P ( Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan ) dengan PDI ( Partai Demokrasi Indonesia ), konflik yang menyebabkan terjadinya pengerusakan fasilitas partai bahkan menimbulkan korban jiwa yaitu pengurus dari salah satu partai tersebut dan kejadian ini terjadi di masa kampanye saat menjelang Pemilu tahun 1999.

Jika ditelaah secara seksama, maka akar permasalahan dari konflik ini meliputi masalah :

1. Masalah kejahatan/kriminal.
2. Masalah Generasi muda.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Muspika bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan aparat Militer adalah berusaha meredam dan menyelesaikan secara tuntas konflik tersebut. Bagi pelaku yang terlibat dalam tindak kriminal, diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan data yang memperlihatkan sebesar 55% menyatakan melapor kepada pihak Polisi, sebanyak 25% menyatakan terjadi konflik diupayakan diselesaikan secara musyawarah. Persentase yang kecil yaitu 15%

menyatakan bahwa masalah konflik ini kasusnya didiamkan saja tampak ada penyelesaian yang pasti. Adanya upaya-upaya ini menyebabkan konflik-konflik yang terjadi di daerah ini dapat teratasi. Hal ini dapat dikatakan berkat adanya kesadaran dari pihak yang bertikai, peranan tokoh agama dan pemuka masyarakat serta keikutsertaan pihak aparat baik TNI-AD, TNI-AU dan Kepolisian.

Suasana kelurahan Polonia saat ini sudah berjalan tenang, karena tidak adanya lagi konflik dan secara perlahan-lahan daerah ini tergolong sebagai daerah yang aman.

## **2. Kelurahan Tegal Sari I – Kecamatan Medan Area.**

Kelurahan Tegal Sari I wilayahnya paling luas, yaitu 189 Ha, dibandingkan dengan daerah Tegal Sari II dan Tegal Sari III. Gambaran umum pemukiman penduduk di Tegal Sari I, dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kelompok etnis, agama, tingkat sosial dan ekonomi. Ditinjau dari keberagaman etnis, penduduk kelurahan Tegal Sari I terdiri atas berbagai suku, namun yang dominan adalah etnis Minang dan Tionghoa, selain etnis Jawa, Batak dan lainnya. Data penduduk berdasarkan etnis tidak diperoleh di kantor Kelurahan maupun kantor Camat. Gambaran di atas disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama di lokasi penelitian. Agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduk yaitu; 45,16 %; Kristen : 35,69 %; Katholik : 13,52 %; Hindu : 1,06 %; Budha : 35,69 %. Agama Islam dianut oleh etnis Minang dan Jawa, sedangkan agama Kristen oleh sebagian besar etnis Batak, dan etnis Cina umumnya menganut agama Budha.

Keberagaman etnis dan agama dipertegas lagi dengan isian angket dimana 89 % responden menyatakan bahwa mereka bertetangga dengan masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan berbagai agama.

Mengenai waktu lamanya responden bermukim di daerah kelurahan Tegal Sari I, hasil wawancara dan angket menunjukkan sebagian besar responden (65 %) menyatakan lebih dari 20 tahun telah bermukim di kelurahan Tegal Sari I, sedangkan yang lebih dari 40 tahun sebanyak 15 % dan selebihnya baru bermukim kurang dari 10 tahun (20%).

Sebelum bermukim di daerah kelurahan Tegal Sari I sebagian besar responden ternyata berasal dari luar kota Medan yaitu sebanyak 55 %, sedangkan 20 % berasal dari kecamatan lain di Kodya Medan, 15 % berasal dari satu kecamatan tetapi lain kelurahan, dan 10 % lagi menyatakan sejak lahir telah tinggal di daerah ini bersama orang tua.

Berbagai alasan dikemukakan para pendatang mengapa mereka memilih daerah Tegal Sari I sebagai tempat bermukim, diantaranya alasan paling utama adalah karena daerah Tegal Sari I mereka nilai sebagai daerah yang aman (50 %), alasan yang kedua mereka memilih daerah Tegal Sari I karena alasan ekonomi, dimana merupakan daerah bisnis (40 %), dan lainnya karena dekat dengan tempat kerja dan keluarga (10 %).

Mengenai jenis mata pencaharian penduduk kelurahan Tegal Sari I dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel VI: Jenis Mata Pencaharian Penduduk Tegal Sari I**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	64	3,97
2.	ABRI	42	2,61
3.	Pegawai Swasta	528	32,75
4.	Wiraswasta/Pedagang	676	41,94
5.	Pengusaha	11	0,68
6.	Buruh	188	11,66
7.	Lainnya	103	6,39
	Jumlah	1612	100

Sumber : Kelurahan Tegal Sari I, Medan 2000

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdagang merupakan jenis mata pencaharian terbesar penduduk kelurahan Tegal Sari I (41,94 %). Hal ini dianggap wajar, mengingat daerah ini merupakan kawasan bisnis. Sebagian daerah "Pasar Sukaramai" (di bagian timur) terletak di kelurahan Tegal Sari I. Etnis China dan Minang umumnya sebagai pemukim terbesar di kawasan ini. Kegiatan bisnis etnis Cina umumnya tidak hanya berdagang kelontong, tetapi juga bahan pangan (sembako). Sedangkan etnis Minang selain berdagang seperti yang dilakukan etnis Tionghoa juga membuka usaha "home industry" berupa usaha konveksi, pembuatan sepatu, dan aksesories keperluan anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan wanita. Data di kelurahan diketahui ada 3 buah industri kecil dan 42 buah industri rumah tangga (*home industry*) di kelurahan Tegal Sari I. Disamping itu sebagian lagi etnis Minang ada yang membuka usaha rumah makan dan restoran. Sedangkan etnis Batak pada umumnya berdagang sayur mayur. Sebagian mereka berdagang di badan jalan bagian tepi pasar Sukaramai, hal ini kerap kali memacetkan jalan. Kemacetan lalu lintas di sekitar pasar Sukaramai sangat mengganggu para pemakai jalan



bagian tepi pasar Sukaramai, hal ini kerap kali memacetkan jalan. Kemacetan lalu lintas di sekitar pasar Sukaramai sangat mengganggu para pemakai jalan dan dikeluhkan masyarakat. Etnis Batak sangat ulet dan pekerja keras serta memiliki daya juang yang tinggi untuk hidup. Beberapa kali mereka di himbau bahkan ditindak agar tidak berjualan di tepi jalan tetapi mereka kerap kembali lagi berjualan, sehingga akhirnya sulit ditanggulangi dan saat ini telah menjadi masalah dalam kegiatan pasar Sukaramai. Berdirinya bank LIPPO dan BII berlantai tiga di jalan Kereta Api mengukuhkan kelurahan Tegal Sari I sebagai kawasan bisnis.

Tingkat ekonomi masyarakat secara umum berada pada katagori menengah, orang-orang kaya adalah mereka yang berada di jalur bisnis. Masyarakat menengah ke bawah terdiri atas buruh-buruh konveksi, pekerja serabutan di pasar dan buruh-buruh di usaha industri rumah tangga lainnya serta pegawai yang bekerja pada berbagai jenis usaha di kawasan ini. Masyarakat menengah dapat dilihat di sekitar gang Kantil, gang Maninjau, dan Gang Umbilin.

Dilihat dari keadaan bangunan tempat tinggal penduduk, kualitas perumahan umumnya permanen. Kawasan bangunan permanen umumnya di jalur utama bisnis, yaitu di jalan Kereta Api dan jalan Denai. Sedangkan pada kawasan "Shadow Zone" (daerah belakang) masih banyak yang semi permanen, khususnya di wilayah gang Sehat dimana terlihat tidak adanya halamanrumah dan tempat anak bermain. Rumah-rumah bersusun rapat, dan sebagian besar rumah kontrakan yang terkesan kumuh. Penataan lingkungan

tampaknya tidak pernah dilakukan secara terencana. Lingkungan pemukiman tumbuh dan berkembang secara alamiah. Sebagaimana masyarakat bisnis pada umumnya, penduduk sangat menginginkan dan tetap berusaha terpeliharanya suasana nyaman dan aman dalam berusaha. Oleh karenanya tingkat integritas penduduk secara umum dapat dikatakan tinggi. Hal ini ditandai oleh tidak pernah terjadi konflik frontal antara sesama warga yang pada dasarnya memiliki latar belakang yang beragam. Dari hasil angket diketahui sebanyak 80 % responden menyatakan mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan jiran tetangga dan 20% menyatakan biasa saja, tetapi tidak ada yang mengemukakan mempunyai hubungan yang kurang harmonis. Keakraban hubungan antar tetangga itu didukung oleh jawaban responden atas pertanyaan apakah mereka pernah meminta bantuan kepada tetangga. Ternyata 75% memilih pernah sesekali, 20 % sering sekali dan hanya 5% yang menyatakan tidak pernah. Adapun bentuk bantuan diterima antara lain bentuk bantuan tenaga (pertolongan menjaga rumah bila bepergian, membantu bila ada acara di rumah, dsb). Dikemukakan oleh responden (85%) menyatakan hal itu, dan 10 % menyatakan memperoleh bantuan berupa meminjam uang, 5% yang menyatakan tidak pernah minta bantuan pada jiran tetangga.

Mengenai pergaulan antar anak, sebanyak 35 % mereka bergaul dengan anak-anak satu kampung/satu kelurahan, tidak ada yang menyatakan bergaul dengan teman sekolah atau di rumah saja.

Terhadap pertanyaan jika mendapat undangan dari tetangga yang berbeda suku dan agama apakah akan menghadiri para responden (100 %) menjawab

Tegal Sari I untuk saling berhubungan dan bergaul, tentu saja dengan saling menghormati.

Responden juga menyatakan saling berkunjung pada saat hari besar agama masing-masing, serta akan menghadiri dan menyambut para tetangga yang mengalami kemalangan.

Walaupun kegiatan bisnis adalah aktivitas yang paling dominan, kegiatan sosial kemasyarakatan tetap berjalan. Beberapa kegiatan antara lain adanya Serikat Tolong Menolong (STM). Hanya saja tidak semua masyarakat menjadi anggota, ditemukan adanya 20% mereka tidak menjadi anggota, ketika ditanyakan alasan tidak menjadi anggota STM, karena mereka bukan penduduk tetap, hanya mengontrak rumah di daerah tersebut, dan sewaktu-waktu dapat saja pindah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Berikut adalah data perkumpulan sosial di kelurahan Tegal Sari I.

**Tabel VII. Jumlah Perkumpulan Sosial di Kelurahan Tegal Sari I.**

No.	Nama Perkumpulan Sosial	Jumlah
1.	LKMD	1
2.	Serikat Tolong Menolong	15
3.	Kelompok Muda Mudi	3
	Jumlah	19

Sumber : Kelurahan Tegal Sari I

Kegiatan gotong-royong dan siskamling walau tidak terlalu aktif namun secara resmi masih ada dan dapat diaktifkan kapanpun bila dibutuhkan. Para responden sangat setuju adanya gotong-royong dan siskamling demi kebersamaan. Tetapi bagi masyarakat etnis Cina walaupun

mereka setuju dengan adanya gotong-royong dan siskamling tetapi ketika dimintakan keikutsertaan dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat untuk turut serta secara langsung menyatakan kurang setuju bila diwajibkan turut berpartisipasi, menurut mereka cukup diupayakan kepada orang lain. Dalam hal ini terlihat masyarakat etnis Cina tidak mau bersusah payah dan ambil resiko serta terkesan kurang peduli. Dilihat dari sikap ini etnis Cina tampaknya membatasi diri untuk bergaul sama dengan masyarakat dari etnis lainnya. Umumnya pemukiman mereka mengelompok dan berpagar besi yang kokoh. Hal ini menunjukkan sikap keterbukaan dari kalangan etnis Cina terhadap masyarakat etnis lainnya masih belum terwujud sepenuhnya.

Konflik yang terjadi di daerah pemukiman umumnya para warga menyatakan tidak pernah ada (65%) tetapi 35% menjawab pernah terjadi konflik. Dari 35% responden yang menyatakan pernah terjadi konflik, mengemukakan bahwa faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut adalah masalah anak muda (43%) dan selebihnya 57% konflik antar OKP dalam upaya perebutan lahan (sebagai upaya mendapatkan penghasilan dari menjaga keamanan, parkir, pengelolaan kawasan bisnis, dsb). Responden menyatakan para anak muda yang terlibat konflik tersebut umumnya telah dipengaruhi oleh minuman beralkohol dan mungkin juga mereka mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Dari beberapa hal yang ditanyakan dalam wawancara dengan informan, faktor penyebab munculnya konflik tersebut adalah masalah ekonomi/kemiskinan, masalah disorganisasi keluarga, masalah generasi

muda, masalah agama dan moral, serta masalah lingkungan hidup. Sedangkan akibat terjadinya konflik antaranak muda tersebut umumnya hanya menjurus kepada tindak kekerasan dan perkelahian. Tidak ada yang sampai merusak gedung fasilitas perumahan, pertokoan maupun tempat ibadah, apalagi perkosaan dan pembunuhan. Kalaupun ada yang tampak adalah pengrusakan terhadap POSKO OKP yang bertikai, seperti dibakar dan pelemparan batu, dan saat ini sudah mulai ditata kembali. Demikian juga ditemukan adanya pertokoan yang rusak terutama kaca-kaca jendela.

Dari keterangan informan diketahui bahwa pengrusakan terhadap ruko-ruko tersebut bukan diakibatkan adanya konflik antaranak muda yang bertikai di kawasan kelurahan Tegal Sari I, tetapi itu dampak dari kerusuhan massal pada Mei 1998. Para perusuh bukanlah masyarakat warga kelurahan, tetapi massa yang bergerak melakukan demonstrasi tidak diketahui dari mana asalnya (menurut informan sepertinya ada pengorganisasian massa yang melakukan kerusuhan tersebut) mereka menuju ke arah Aksara Plaza. Sambil lewat mereka melempari rumah dan pertokoan sepanjang jalan, tetapi yang mereka rusak hanyalah rumah dan pertokoan milik etnis tertentu saja (etnis Cina). Pada saat kerusuhan massal tersebut dipergunakan berbagai simbol identitas seperti sajadah, ulos, dan tulisan "ini milik pribumi". Hal ini memberi kesan adanya sikap kecemburuan sosial terhadap etnis Cina yang tingkat sosial ekonominya lebih baik.

Jika terjadi konflik antar warga upaya mengatasinya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bila dimungkinkan mereka yang bertikai didamaikan

dengan cara musyawarah, hal ini dilakukan oleh aparat kelurahan (57%), tetapi bila telah menurus pada tindakan kriminal biasanya para pelaku dilaporkan ke polisi (43%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, terutama mereka yang telah bermukim di kelurahan ini sejak tahun 1950-an, persaingan dalam dunia bisnis masih berlangsung normal dan wajar. Perbedaan suku, agama, dan lainnya tidak menimbulkan sikap-sikap saling mencurigai, berprasangka negatif, sikap antipati, apalagi kecemburuan sosial. Hal ini terjadi karena dalam dunia bisnis dimana masyarakat Tegal Sari I umumnya menggantungkan penghasilannya, membutuhkan suatu kondisi yang aman dan mereka saling membutuhkan satu sama lain baik sebagai majikan dan buruh ataupun pekerja lainnya. Sikap keterbukaan antar warga masyarakat pada umumnya terlihat sangat baik, terutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan, baik dalam keluarga maupun dalam kegiatan keagamaan. Hal ini terlihat pada masyarakat etnis Minang yang umumnya mereka tergabung dalam organisasi Muhammadiyah, dan mereka telah dapat membangun TK dan Sekolah Dasar. Dan berdasarkan pengamatan peneliti tidak terlihat adanya tanda-tanda akan terjadinya konflik yang bersifat terbuka antar warga, paling tidak dalam waktu dekat ini.

### **3. Kelurahan Lalang – Kecamatan Medan Sunggal.**

Kelurahan Lalang terletak di wilayah barat daerah Kodya Medan dengan luas 125 Ha, dan berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang yang dipisahkan oleh sungai Sunggal. Daerah kelurahan Lalang merupakan

jalur lalu lintas ke luar kota Medan seperti Kodya Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, dan ke provinsi Aceh, karena itu perkembangannya cukup pesat terutama pada sepuluh tahun terakhir ini sejak berdirinya terminal terpadu "Pinang Baris" tahun 1993. Disamping itu juga letaknya tidak jauh dari daerah kawasan Industri jalan Binjai yaitu  $\pm 1,5$  km.

Pembangunan terminal terpadu "Pinang Baris" diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Perbaikan dan pelebaran jalan mengakibatkan banyak rumah dan bangunan yang tergusur dan kehilangan halaman depan rumah. Perubahan ini segera di respon dengan cepat oleh orang-orang yang bergerak di dunia bisnis terutama etnis Cina, mereka melihat besarnya peluang untuk mencari keuntungan. Mereka segera membeli tanah dan gedung yang berada disekitar terminal, disepanjang pinggir jalan arah ke terminal (Jln. T.B. Simatupang) dan Jln. Binjai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama tanah-tanah yang umumnya dahulu dihuni warga etnis Melayu berpindah tangan, dan mulailah berdiri rumah-rumah toko (Ruko) dengan gedung-gedung bertingkat. Keberadaan ini sangat mendukung keberadaan pasar "Sunggal" yang selama ini telah lama ada. Saat ini daerah kelurahan Lalang telah menjadi kawasan bisnis yang cukup ramai, dan sibuk sepanjang hari. Apalagi kini terdapat dua supermarket/pasar swalayan yang dekat dengan pasar Sunggal dan sebuah pusat perbelanjaan grosir yang cukup megah yang berjarak  $\pm 1$  km dari pasar Sunggal yaitu PT. Makro Indonesia. Menurut data yang peneliti peroleh dari kelurahan, selain pusat perbelanjaan di atas, terdapat 130 kios yang berada di pasar Sunggal,

dan 120 toko yang berada di pinggir jalan utama yaitu jalan Binjai dan jalan T.B. Simatupang serta 90 warung, dan 2 buah Bank.

Perkembangan yang sangat pesat juga ditandai dengan dibangunnya empat kompleks perumahan untuk kelas menengah ke atas. Sayangnya perubahan yang sangat pesat ini kurang dapat diikuti oleh warga kelurahan Lalang etnis Melayu yang pada awalnya cukup dominan menempati daerah ini, dan hal ini sangat disesalkan oleh Bapak Suhijat M. Nur selaku kepala kelurahan Lalang yang beretnis Melayu. Menurut beliau masyarakat Melayu tidak siap bersaing dan tidak mempunyai daya saing yang tinggi karena rendahnya sumber daya manusia, karena umumnya tingkat pendidikan sangat tidak memadai sehingga tidak mempunyai modal keterampilan dan keahlian, terutama keterampilan bisnis serta tidak mempunyai modal materi. Saat ini sebagian etnis Melayu telah tergusur dan pindah ke daerah pelosok yang jauh dari kota Medan, dan sudah tidak lagi sebagai penduduk dominan kelurahan Lalang. Bahkan ditegaskan Bapak Suhijat M. Nur dan aparat kelurahan lain, saat ini warga masyarakat etnis Cina telah mencapai  $\pm$  48% dari jumlah penduduk 11.852 orang. Penduduk lainnya terutama dari etnis Batak Karo, Minang, Batak Toba, Mandailing, Jawa, Tamil, dan lainnya. Sehingga keberagaman masyarakat telah terlihat baik dari segi etnis maupun agama. Sebelum bermukim di kelurahan Lalang, sebanyak 45% responden menyatakan mereka tinggal di kecamatan lain di Kodya Medan; 40% berasal dari luar Medan; 5% berasal dari satu kecamatan tetapi lain kelurahan dan 10% menyatakan telah bermukim di kelurahan Lalang sejak lahir. Sebagian



warga etnis Cina bermukim di kelurahan ini disebabkan karena terusir dari daerah Aceh pada tahun 1977. Mereka ditempatkan di pasar lima gang Warga Pancasila, dan ditempat ini terdapat sebuah pasar Pagi.

Dari responden dan informan yang ditemui, mereka yang menyatakan telah tinggal di kelurahan Lalang kurang lebih 10 tahun sebanyak 15%, antara 11 – 20 tahun sebanyak 20% dan selebihnya telah bermukim lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 65%.

Walaupun daerah ini merupakan kawasan bisnis yang cukup ramai, ternyata mata pencaharian penduduk sebagian besar yaitu 39,96% adalah karyawan swasta, kemudian berwiraswasta/pedagang 28,26%, tukang (membangun rumah) 19,72%, PNS 7,23% dan selebihnya sebagai buruh, ABRI, dan bertani (43%).

Menurut informasi yang diperoleh dari penduduk, yang telah bermukim sejak tahun 1970-an, daerah ini tergolong cukup aman, dan alasan keamanan bagi sebagian (60%) memilih daerah kelurahan Lalang sebagai tempat bermukim, dan masing-masing 15% karena alasan dekat dengan tempat kerja, dan teman sekampung, serta 10% dengan alasan dekat dengan keluarga.

Penanganan keamanan menurut peneliti cukup baik di daerah ini. Kerjasama aparat kelurahan dengan kepolisian serta warga masyarakat dan BABINSA (Koramil) berjalan dengan baik.

Di persimpangan jalan Binjai dan jalan T.B. Simatupang menuju ke terminal dan dekat pasar Sunggal ada sebuah Pos Polisi, disamping itu ada II Pos Kamling dan II kelompok Pemuda Kampung yang aktif.

Pembinaan kehidupan beragama berjalan secara alamiah sesuai kebutuhan warga masyarakat. Aparat kelurahan tidak mencampuri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh majelis-majelis agama yang ada. Fungsi aparat kelurahan hanya sebagai pembina yang bilamana dibutuhkan akan turut serta membantu dan memberi izin atas perayaan-perayaan agama yang dilaksanakan masing-masing majelis. Saat ini terdapat 10 majelis Ta'lim, 1 majelis gereja, 1 majelis Budha, dan 5 kelompok remaja mesjid. Pada saat ke lokasi penelitian, pihak kelurahan sedang membina kelompok kesenian Nasyid yang anggotanya adalah para remaja mesjid. Rencananya group kesenian Nasyid tersebut akan turut menyemarakkan acara pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan Medan Sunggal dan ikut lomba Nasyid se Kodya Medan.

Dalam kehidupan bertetangga, 65% responden menyatakan mereka bertetangga dengan warga yang berasal dari berbagai etnis dan agama, selebihnya mereka berada di kawasan yang homogen, yaitu di kompleks perumahan yang umunya dihuni etnis Cina. Dan di dalam pergaulan sebanyak 35% responden menyatakan cukup akrab dengan para tetangga, sedangkan selebihnya menyatakan biasa saja. Jawaban biasa-biasa saja menunjukkan mereka tidak terlalu akrab tetapi bukan berarti tidak harmonis. Seperti diketahui masyarakat kelurahan Lalang yang saat ini 48% warganya merupakan etnis Cina, umumnya bekerja sebagai pedagang dan berbisnis dari

pagi hingga petang bahkan malam hari, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bergaul akrab, tetapi mereka tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan tidak saling mengganggu. Ini terbukti pada peristiwa Mei 1998 yang menjadi tragedi Nasional, walaupun 48% etnis Cina sebagai warga kelurahan Lalang, tetapi di kelurahan Lalang tidak terjadi penjarahan, pelecehan terhadap wanita etnis Cina, dan pengrusakan terhadap rumah, gedung dan pertokoan yang dilakukan oleh warga masyarakat kelurahan Lalang. Memang di beberapa pertokoan terjadi kerusakan seperti ada yang kacanya pecah terkena lemparan batu, tetapi menurut para informan itu dilakukan oleh massa yang datang dari arah jalan Binjai yang berjalan berbondong-bondong menuju Medan untuk berdemonstrasi. Saat melintas mereka melempari ruko-ruko milik etnis Cina, tetapi hanya sekitar 5% yang kacanya pecah-pecah. Hal tersebut karena umumnya jendela mereka diberi jerjak/teralis besi yang kokoh atau terlindungi oleh tirai dari bambu. Bahkan menurut Bapak Ismail Rangkuti selaku kepala lingkungan Pinang Baris II<sup>A</sup> (lingkungan VIII) pada saat kerusuhan Mei 1998, para warga yang berasal dari etnis lain memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga etnis Cina dengan mengadakan penjagaan dan waspada atas adanya orang atau pihak-pihak yang akan membuat kerusuhan di lingkungan mereka, dan meningkatkan ronda malam di pos-pos Kamling. Kejadian itu menambah tingginya tingkat integritas masyarakat di kelurahan Lalang, karena sejak saat itu para warga etnis Cina yang umumnya menyetujui adanya ronda malam tetapi tidak mau turut berjaga dan hanya memberi upah, mulai ada yang turut

serta berjaga, meskipun baru sebagian kecil. Tetapi paling tidak sudah ada kesadaran pentingnya kerjasama dan sikap keterbukaan antar warga terutama yang berbeda budaya.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Lalang pada umumnya baik, hal ini ditandai dengan keadaan bangunan rumah yang umumnya permanen sebanyak 1921 buah (60,69%), 701 rumah semi permanen (22,15%) dan 543 rumah non permanen (17,16%). Mereka yang menempati rumah permanen dari tingkat ekonomi sosial kelas menengah ke atas yang umumnya terdiri etnis Cina, sedangkan kelas menengah ke bawah adalah para pegawai, tukang, buruh, pekerja mocok-mocok yang bekerja di pasar, umumnya dari etnis Pribumi. Hal ini menurut informan tidak sampai menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial diantara warga. Menurut pengamatan peneliti, tampaknya mereka saling membutuhkan, karena banyak warga dari ekonomi rendah bekerja pada warga etnis Cina, baik sebagai penjaga toko, pekerja pabrik ataupun pekerja rumah tangga.

Penataan bangunan rumah dan lingkungan menurut pengamatan peneliti, ada yang tertata baik terutama yang berada di pinggir jalan utama, tetapi rumah-rumah yang berada di gang-gang sebagian kurang tertata, terutama terlihat adanya saluran air limbah rumah tangga yang tidak di semen dan ada parit yang tidak di semen sehingga bila turun hujan dapat mengakibatkan banjir. Selain kompleks perumahan, umumnya bangunan rumah penduduk tumbuh secara alami.

Untuk menunjang kehidupan masyarakat kelurahan Lalang terdapat fasilitas umum dan sosial yang mendukung di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, olah raga dan komunikasi. Tabel berikut memperlihatkan jumlah sarana yang dimiliki berdasarkan jenisnya.

**Tabel VIII: Jumlah Sarana Umum di Kelurahan Lalang.**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	<u>Peribadatan</u>	
	a. Mesjid	6
	b. Musholla	4
	c. Gereja	1
	d. Vihara	9
		20
2.	<u>Kesehatan</u>	
	a. Puskesmas	1
	b. RSU Swasta	1
	c. RS. Bersalin	3
	d. Poliklinik	2
e. Apotik/Depot Obat	8	
		15
3.	<u>Pendidikan</u>	
	a. TK	3
	b. SD	7
	c. SLTP	5
	d. SLTA	3
e. Balai Latihan Kerja (BLK)	1	
		19
4.	<u>Sosial</u>	
	a. Panti Asuhan	2
	b. Rumah Singgah	2
		4
5.	<u>Olah Raga</u>	
	a. Lap. Sepak Bola	1
	b. Lap. Volley	2
	c. Lap. Badminton	4
	d. Lap. Tennis	1
	e. Lap. Tennis Meja	6
f. Rumah Bilyard	8	
		22
6.	<u>Komunikasi</u>	
	a. Telepon Umum	8
	b. Wartel	6
		14

Sumber: Kelurahan Lalang, Medan.

Walaupun secara umum warga masyarakat kelurahan Lalang menyatakan tidak pernah mengalami konflik dengan jiran tetangga/masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, tetapi bukan berarti tidak ada konflik pada masyarakat tersebut. Terbukti dari pertanyaan apakah di daerah ini pernah terjadi konflik yang menjurus ke arah negatif, 80% responden menjawab tidak dan 20% menjawab pernah. Mereka yang menjawab pernah menyatakan latar belakang konflik karena masalah anak muda dan perbatasan tanah. Konflik anak muda seperti halnya di daerah lain umumnya karena mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga menjadi “preman” yang biasanya memperoleh uang dari jasa keamanan dan parkir. Tetapi di daerah ini tidak/belum ada konflik antar Organisasi Kepemudaan (OKP). Menurut informan, para anggota OKP tersebut umumnya mempunyai hubungan yang baik, karena sebagian anggota dari OKP tersebut, seperti PP, IPK, AMPI, dan sebagainya, umumnya mereka masih mempunyai hubungan famili, sehingga mereka menyadari bila terjadi permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan baik, tanpa merugikan satu sama lain (*win – win solution*). Di Medan pada tahun 1998 – 2000 pernah terjadi konflik antar OKP yang mengakibatkan banyaknya kerugian bahkan korban jiwa. Konflik antar OKP terjadi di beberapa tempat, antara lain di kawasan Padang Bulan dan Perumnas Mandala.

Bekas-bekas konflik tampaknya tidak terlihat di daerah kelurahan Lalang. Sikap masyarakat yang diperkirakan dapat menimbulkan konflik/ketidakteraturan sosial seperti saling curiga, berprasangka negatif,

sikap antipati dan kecemburuan sosial tampaknya tidak terlihat. Mengenai konflik antar warga yang disebabkan oleh perbatasan tanah mulai muncul pada saat jual-beli tanah yang banyak terjadi akibat perkembangan daerah ini. Biasanya ukuran tanah disebabkan dalam surat tidak akurat karena ada tanda kurang lebih ( $\pm$ ). Dulunya hal ini tidak begitu dipersoalkan, mungkin karena harga tanah tidak setinggi saat ini yang mencapai ratusan ribu rupiah permeter. Karena jual beli masing-masing tanah tidak selalu bersamaan maka sering timbul sengketa akibat ukuran yang tidak akurat itu.

Penyelesaiannya terhadap terjadinya konflik ditempuh berbagai cara. Umumnya bila terdapat konflik sedapat mungkin diselesaikan secara damai, perdamaian ini bisa ditempuh sendiri tanpa melibatkan aparat lingkungan/kelurahan, tetapi bila dibutuhkan mereka perlu dipanggil dan dapat didampingi BABINSA (Koramil). Bila konflik tidak dapat terselesaikan atau konflik tersebut telah menjurus ke tindakan kriminal maka biasanya diselesaikan di Kepolisian.

## **B. Pembahasan.**

### **1. Kesenjangan Sosial.**

Dari hasil temuan di ketiga lokasi penelitian diketahui bahwa warga masyarakat yang bermukim cukup heterogen, baik ditinjau dari suku, agama dan tingkat sosial ekonomi. Di kelurahan Polonia umumnya responden dan informan menyatakan bahwa mereka bertetangga dengan warga masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan agama, sementara di kelurahan Tegal Sari I – 89%, dan kelurahan Lalang – 65%.

Faktor keamanan merupakan alasan utama para warga masyarakat memilih bermukim di ketiga lokasi penelitian, seperti dikemukakan responden dan informan dari kelurahan Lalang = 60%, kelurahan Tegal Sari I = 50% dan kelurahan Polonia = 30%. Di tinjau dari lamanya bermukim sebagian besar responden dan informan menyatakan lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang telah dari 40 tahun, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan kurang dari 10 tahun.

Lamanya warga saling bergaul, berinteraksi satu sama lain dalam hubungan sosial dapat mempererat dan meningkatkan integrasi sosial. Menurut Sorokin, tingkat integrasi masyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan. Mengingat sebagian besar warga masyarakat telah berinteraksi sosial lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 40 tahun, di antara warga telah terjalin integrasi sosial yang baik, dimana para warga masyarakat telah memiliki pola kebersamaan hidup dalam suatu masyarakat yang majemuk/heterogen, saling hidup berdampingan, penuh toleransi, saling mengerti, terbuka, dan dinamis. Walaupun demikian masih ditemukannya sebagian warga masyarakat etnis Cina yang memiliki kecenderungan *segregatif* (mengucil) dan kurang memiliki sikap keterbukaan dengan etnis lainnya. Mereka ini umumnya hidup mengelompok dengan bentuk rumah saling bersebelahan dinding yang umumnya berpagar besi.

Sikap hidup warga etnis Cina umumnya hampir sama di daerah-daerah lain di kawasan Kodya Medan. Sikap hidup ini tampaknya dipengaruhi oleh sejarah keberadaan mereka sejak masa penjajahan Belanda.



Pada masa itu mereka telah digolong-golongkan dan dibeda-bedakan bahkan dipisahkan berdasarkan keturunan bangsanya, yaitu golongan Eropa, Timur Asing (Arab, Cina, India) dan golongan pribumi. Disamping itu kesibukan warga etnis Cina yang umumnya bergerak di bidang bisnis, menyebabkan mereka tidak mempunyai waktu untuk mengikuti kehidupan sosial, bergaul dengan sesama warga lainnya, kecuali pada sata-saat tertentu saja.

Kerukunan hidup bermasyarakat ditandai oleh kemampuan masyarakat untuk dapat menerima perbedaan yang ditimbulkan karena perbedaan budaya, kebiasaan, sistem nilai, dan cara hidup. Secara umum anggota masyarakat tidak memandang perbedaan suku dan agama saat ia berinteraksi. Dengan kata lain, bentuk interaksi yang terjadi tidak didasarkan atas suku dan agama, dan memandang warga masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku dan agama itu sebagai satu kesatuan masyarakat. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang umumnya menyatakan berhubungan cukup akrab dengan para tetangga, terbukti adanya sikap saling tolong-menolong yang selalu diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga, materi, serta selalu hadir bila di undang pada acara-acara pesta keluarga.

Keserasian Sosial dalam masyarakat dipengaruhi juga oleh pembinaan warga oleh aparat pemerintahan, dalam hal ini lurah dan jajarannya serta BABINSA (Koramil) . Menurut para informan kerjasama dan partisipasi warga masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban berlangsung cukup baik di ketiga lokasi penelitian.

## 2. Bentuk Konflik.

Dari temuan penelitian dapat dikatakan tingkat keserasisan sosial di daerah pemukiman lokasi penelitian cukup baik, yang terlihat dari adanya kebersamaan hidup dalam suatu masyarakat yang majemuk dan tidak ditemukan adanya sikap penolakan, mempunyai sikap saling mengerti (pengertian) walau ada perbedaan-perbedaan. Adanya keterbukaan menyebabkan masyarakat dapat menerima perbedaan-perbedaan yang ada hal ini menyebabkan masyarakatnya selalu berkembang dan dinamis.

Keadaan masyarakat di atas, bukan berarti tidak ada ditemukan konflik diantara warga masyarakat. Pengakuan warga atas adanya konflik yang terjadi dikemukakan responden dan informan di kelurahan Polonia: 100%, Kelurahan Tegal Sari I: 35% dan kelurahan Lalang: 20%. Menurut Dahrendorf, konflik atau pertentangan sosial selalu terjadi dalam suatu struktur atau sistem tertentu.

Bentuk konflik yang terjadi ada yang bersifat laten (tersembunyi) dan terbuka. Konflik yang bersifat laten, seperti masih adanya segolongan warga Cina yang bersifat *segregatif* (mengucil) dan membatasi diri dalam berinteraksi sosial dengan warga etnis lainnya. Sikap ini tentu saja dapat melahirkan rasa curiga dan prasangka negatif. Kurang adanya sikap keterbukaan dan kerjasama juga terlihat dari adanya pengakuan responden dan informan yang menyetujui adanya perkumpulan sosial seperti STM, Gotong royong dan Siskamling, tetapi ketika dimintakan kesediaanya untuk berpartisipasi ternyata umumnya masyarakat etnis Cina keberatan, dan hal itu

cukup diupahkan kepada orang lain saja. Dalam hal ini rasa kebersamaan (*togetherness*) dari masyarakat yang majemuk tersebut kurang terlihat.

Konflik yang bersifat terbuka di tandai dengan adanya perkelahian dan bentrokan fisik. Konflik terbuka ini terjadi di antara warga masyarakat dan generasi muda baik antar individu maupun organisasi kepemudaan (OKP). Konflik antar individu diantara para pemuda biasanya disebabkan saling mengejek, adanya kesalahpahaman. Kemudian dipengaruhi oleh para pemuda lainnya yang umumnya para pengangguran maka terjadilah perkelahian.

Konflik antar OKP terutama antara Pemuda Pancasila (PP) dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di wilayah Kodya Medan telah berlangsung sejak tahun 1995, diawali di daerah Simpang Kwala – Padang Bulan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, sejak kejadian itu diantara kedua OKP tersebut terjadi permusuhan yang membawa konsekuensi kepada para anggota OKP tersebut di hampir semua wilayah Kodya Medan, seperti di Simpang Limun, Polonia, Mandala dan lain-lainnya. Di ketiga lokasi penelitian, konflik antara OKP ini paling parah terjadi di kelurahan Polonia, yang diwarnai dengan peristiwa “panah beracun”. Akibat konflik ini warga masyarakat kelurahan Polonia merasa cemas karena seringnya ada korban, dan pada saat terjadinya bentrokan yang umumnya dilakukakn di malam hari cukup banyak kerugian yang diderita warga, seperti adanya rumah yang terkena sasaran lemparan batu dan benda-benda keras lainnya, bahkan ada

yang mengambil kesempatan dengan menjarah perabotan rumah terutama barang elektronik seperti TV, Tape, VCD, dan lainnya.

Konflik secara terbuka juga terjadi di kelurahan Polonia, pada saat menjelang Pemilu tahun 1999 antara partai politik PDI dan PDI-Perjuangan. Di Kelurahan Tegal Sari I juga terjadi konflik antar anggota OKP, yaitu PP dan IPK tetapi tidak separah di kelurahan Polonia. Adanya konflik antar kedua OKP tersebut, menyebabkan warga masyarakat menjadi cemas walau secara material mereka tidak dirugikan karena yang dirusak adalah Posko-Posko kedua OKP tersebut, tetapi Kelurahan Tegal Sari I merupakan kawasan bisnis, warga masyarakat sangat merugi bila konflik tetap berlangsung, karena warga kurang leluasa menjalankan bisnisnya bila keadaan tidak aman.

Di Kelurahan Lalang, konflik antar OKP ini tidak sampai terjadi, karena itu tidak terdengar adanya konflik terbuka di antara OKP, baik PP maupun IPK. Mengapa konflik antar kedua OKP yang banyak terjadi di daerah lain tidak terjadi di kelurahan Lalang? Menurut para informan karena para pemuda yang menjadi anggota kedua OKP itu sebagian besar masih mempunyai hubungan kekerabatan/famili, sehingga bila ada permasalahan di antara kedua OKP tersebut para pengurusnya lebih memilih penyelesaian masalah dengan musyawarah dan jalan damai. Mereka beranggapan bila sampai terjadi konflik terbuka dikhawatirkan akan melukai saudaranya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri.

Bentuk konflik antara golongan atas dan bawah berdasarkan status sosial ekonomi, tampaknya tidak terlihat. Di kelurahan Lalang misalnya

terjadi hubungan yang bersifat saling membutuhkan di antara warga golongan ekonomi tinggi dan rendah, walaupun sebagian penduduk asli banyak tersingkir akibat kehadiran etnis Cina yang telah mencapai 48% yang umumnya menguasai sektor ekonomi. Berkembangnya sektor ekonomi yang umumnya dikuasai etnis Tionghoa menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar Kelurahan Lalang.

Walaupun perbedaan status sosial ekonomi sering dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya rasa kecemburuan sosial, sepanjang informasi yang diterima peneliti, tidak ditemukan pernah terjadinya konflik sosial karena hal itu.

Apakah hal itu dipengaruhi sikap hidup masyarakat perkotaan yang kurang peduli atau bersikap “cuek” dengan lingkungan sekitar, perlu ada penelitian lebih lanjut.

### **3. Faktor Penyebab Konflik.**

Konflik yang muncul baik yang bersifat tersembunyi (laten) maupun terbuka umumnya terjadi di antara para pemuda.

Ada dua golongan pemuda yang terlibat dalam konflik tersebut, pertama pemuda sebagai pribadi dan kedua sebagai anggota organisasi kepemudaan (OKP). Golongan pertama ini terlibat konflik disebabkan adanya ketidakserasian dengan para pemuda lainnya seperti salah pengertian, ketersinggungan terhadap harga diri, merasa diremehkan, saling ejek-mengejek dan lainnya. Mereka menyelesaikan persoalannya sebagai anak muda yang masih bersifat emosional sehingga sering terjadi perkelahian.

Perkelahian tersebut dapat menjurus ke tindakan kriminal/kejahatan bila akibat konflik tersebut menimbulkan dendam dan adanya rencana untuk menyakiti lawan dengan menggunakan senjata tajam. Menurut para informan, para pemuda yang sering terlibat dalam tindakan kejahatan adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Para informan mengemukakan kekhawatirannya terhadap maraknya penggunaan obat-obat terlarang (narkoba) dan banyaknya dijual minuman keras secara bebas, dianggap merupakan faktor penyebab makin meningkatnya kejahatan pemuda akhir-akhir ini. Dr. Zuhana Lubis, kepala Puskesmas di kelurahan Tegal Sari I, secara tegas menyatakan penyebab munculnya konflik para pemuda adalah karena faktor kemiskinan (masalah ekonomi) dan lingkungan.

Masalah ekonomi/kemiskinan sebagai penyebab munculnya konflik menjadi semakin parah setelah krisis ekonomi melanda negara kita tahun 1997. Banyak generasi muda tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan dengan bekal ijazah SMA tentu sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi lapangan pekerjaan juga sangat terbatas, sehingga banyak muncul pengangguran di tengah-tengah masyarakat yang membawa berbagai persoalan. Kurangnya pembinaan terhadap generasi muda dan perhatian orang tua, menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang negatif seperti berjudi, mabuk-mabukan, mencuri, menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), berkelahi dan sebagainya.

Selanjutnya Zulhana mengemukakan, dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan tentu akan sulit membangun warga masyarakat yang

erkualitas. Keadaan tersebut turut mempengaruhi lingkungan fisik. Adapun lingkungan sosial masyarakat setempat. Di tinjau dari lingkungan fisik terlihat kurang tertatanya susunan bangunan gedung dan perumahan terutama yang berada di gang-gang, penanganan limbah rumah tangga yang kurang baik ditandai dengan adanya gang yang tidak mempunyai parit, dan adanya saluran parit yang tidak di semen sehingga bila turun hujan dapat mengakibatkan banjir, beberapa rumah tidak memiliki pekarangan dan terkesan kumuh, semuanya ini mempengaruhi kesehatan fisik dan mental penghuninya yang dengan sendirinya membawa dampak pada lingkungan sosial yang cenderung berkualitas rendah.

Ketidakserasian lingkungan hidup masyarakat ditentukan oleh peranan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sosial, diutamakan tingkat kelurahan. Karena masyarakat yang umumnya berada di bawah garis kemiskinan tidak mampu membangunnya.

Menurut aparat kelurahan, ada biaya pembangunan yang diberikan PEMDA Tingkat II kepada pemerintah Desa/Kelurahan sebesar ± Rp 17.000.000,-/tahun, hanya saja anggaran tersebut kurang mencukupi, oleh karena itu diadakan prioritas anggaran. Dan menurut aparat kelurahan pembangunan jalan di gang-gang sudah diadakan perbaikan, tetapi untuk saluran air limbah rumah tangga/parit masih ada yang belum dapat dikerjakan dan rencananya menunggu anggaran tahun 2001.

Sementara itu kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan (OKP) menurut informan sebagian besar anggotanya juga tidak

mempunyai pekerjaan tetap dan masyarakat sering menyebut mereka “preman”. Di antara OKP yang ada yaitu Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (PK), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), Karang Taruna, Bina Bakat Abadi (BBA), OKP yang terlibat konflik saat ini adalah PP dan IPK. Faktor penyebab munculnya konflik di antara OKP tersebut adalah perebutan lahan (90%) yang menyangkut lahan parkir dan keamanan, yang dari penguasaan lahan tersebut dapat menghidupi organisasinya. Pengutipan jasa parkir dan keamanan yang dilakukan di wilayah yang dikuasai OKP lain dianggap suatu pelanggaran dan tidak menghormati OKP yang menguasai wilayah itu, sehingga menimbulkan perlawanan yang dapat menjurus kepada perkelahian dan tindak kekerasan lainnya. Karena pertikaian itu melibatkan antar OKP yang masing-masing mempunyai anggota cukup banyak dan dilandasi rasa solidaritas antar anggota, konflik yang tadinya kecil berubah menjadi besar dan akhirnya melibatkan kedua OKP tersebut yang ada di kawasan Kodya Medan.

Dari Uraian di atas dapat dikemukakan beberapa faktor penyebab konflik di ketiga lokasi penelitian, yaitu:

1. Masalah Generasi Muda.
2. Masalah Ekonomi/Kemiskinan.
3. Masalah Kejahatan/Kriminal.
4. Masalah Lingkungan.



#### 4. Model Penyelesaian Konflik.

Konflik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat perlu diselesaikan, agar keseimbangan dan kestabilan masyarakat terpelihara, serta masyarakat dapat terus membangun dirinya.

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi berbeda-beda penanganannya, tergantung dari bentuk konflik itu dan resiko yang ditimbulkannya.

Menurut informan adakalanya konflik terjadi dibiarkan saja dan sejalan dengan waktu yang berlalu konflik dianggap selesai. Penyelesaian seperti ini umumnya terhadap konflik yang tidak menyangkut banyak pihak dan permasalahannya sederhana, seperti adanya kesalahpahaman, masalah anak-anak, pertengkaran antar anak muda secara pribadi dan lainnya.

Tetapi bila konflik yang terjadi dianggap dapat mengakibatkan kerugian dan membahayakan pihak yang bertikai dan warga masyarakat lainnya, biasanya warga masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke aparat pemerintahan baik kepala lingkungan, pengurus LKMD dan Lurah. Menurut aparat pemerintahan desa di kelurahan, mereka hanya akan menangani masalah pertikaian apabila diminta oleh warga masyarakat, karena bila tidak dilaporkan mereka beranggapan konflik tersebut dapat diselesaikan sendiri oleh para warga yang bertikai tersebut. Hasil kesepakatan yang dicapai dimana aparat keamanan turut serta sebagai penengah tidaklah mutlak, artinya bisa saja pihak-pihak yang bertikai menerima kesepakatan yang diajukan oleh aparat kelurahan, tetapi bila pihak-pihak yang bertikai tidak

mau menerimanya dan mereka menentukan sendiri jalan keluarnya dengan arahan dari aparat kelurahan itu lebih baik. Biasanya aparat kelurahan dalam menyelesaikan konflik bekerja sama dengan BABINSA (Koramil).

Selanjutnya adakalanya tanpa diberitahu/dilaporkan oleh warganya, para aparat kelurahan dan keamanan turun tangan langsung menangani konflik yang terjadi. Hal ini karena dianggap akibat dari konflik tersebut telah membawa kerugian bagi warga masyarakat lain yang tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka terkena dampak dan menjadi sasaran kemarahan pihak yang bertikai, apalagi bila sampai menimbulkan kerusakan terhadap gedung dan rumah, adanya warga yang terluka dan korban jiwa. Seperti halnya konflik antar OKP yang terjadi di kelurahan Polonia dan kelurahan Tegal Sari I pihak aparat keamanan menangkap warga yang berbuat kriminal/tindak kekerasan tersebut. Walaupun polisi sering terlambat tiba di lokasi pertikaian, sehingga mereka yang bertikai telah melarikan diri.

Di kelurahan Polonia pernah terjadi konflik yang menimbulkan kerugian dan jatuh korban, pada Oktober tahun 2000 masyarakat mengadakan pertemuan bersama yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama, untuk menyelesaikan permasalahan yang telah meresahkan warga masyarakat. Dari hasil pertemuan itu disepakati adanya pembentukan "Forum Komunikasi Antar Umat Beragama". Dan tampaknya sejak saat itu keadaan telah kembali normal, aman, dan stabil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian konflik yang ditempuh adalah :

- a. Tidak mengundang pihak lain (ketiga) dan mendiadakan konflik.
- b. Mengundang pihak ketiga, baik dari aparat kelurahan maupun dari aparat kemananan.
- c. Melibatkan aparat keamanan (Kepolisian) walau tanpa di undang.

Menurut istilah Kerr seperti dikemukakan Dahrendorf (1986, hlm.283). Cara-cara di atas dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu :

1. *Konsiliasi* bila penyelesaian konflik tersebut tidak mengundang dan menerima nasehat pihak ketiga.
2. *Mediasi*, bila penyelesaian konflik mengundang dan menerima nasehat pihak ketiga, tetapi hanya bersifat fakultatif.
3. *Arbitrasi* (penindasan), apabila penyelesaian konflik mengundang dan menerima nasehat pihak ketiga atau kedua belah pihak wajib menerima nasehat pihak ketiga.

Tampaknya ke tiga cara, yaitu *konsiliasi*, *mediasi*, dan *arbitrasi* dipergunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tiga lokasi penelitian. Ke tiga cara penyelesaian tersebut kegunaannya disesuaikan dengan tingkat konflik yang terjadi.

Dalam pergaulan sehari-hari, interaksi yang akrab dan kebersamaan terdapat melalui sikap tolong-menolong, gotong-royong, dan kegiatan

Sistematika konflik yang terjadi di lokasi penelitian ada yang laten (tersembunyi) dan terbuka. Konflik yang bersifat laten seperti rasa curiga, berprasangka negatif, kurang terbuka, bersifat *segregatif* (mengucil) masih terdapat di antara warga, terutama etnis Cina yang umumnya mempunyai

tingkat ekonomi lebih baik dari warga sekitarnya. Alasan kurang dapat berbaur dengan warga lainnya disamping ketiadaan waktu karena kesibukan berbisnis, mungkin juga dipengaruhi sejarah jaman penjajahan Belanda yang mengadakan perbedaan golongan antara pendatang (etnis Cina) dengan penduduk asli.

Konflik yang bersifat terbuka dapat dilihat dengan adanya perkelahian dan bentrokan fisik. Konflik terbuka terjadi di kalangan pemuda, baik yang bersifat pribadi maupun antar Organisasi Kepemudaan (OKP). Sejak tahun 1995 terjadi perseteruan antara dua OKP yaitu Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) diawali di daerah Simpang Kuala – Padang Bulan Medan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Konflik antar kedua OKP tersebut berlangsung hingga tahun 2000, dan terjadi di beberapa tempat di kawasan Kodya Medan, termasuk di dua lokasi penelitian, kecuali di Kelurahan Lalang – Kecamatan Medan Sunggal. Konflik yang paling parah terjadi di Kelurahan Polonia yang terkenal dengan peristiwa “Panah Beracun”.

Akibat konflik terbuka ini membawa kerugian baik jatuhnya korban jiwa, beberapa rumah terkena sasaran lemparan benda-benda keras dan ada yang menjarah isi rumah serta pengrusakan dan pembakaran terhadap POSKO-POSKO kedua OKP yang bertikai tersebut. Selain antar OKP, terjadi juga konflik antara pendukung partai PDI dan PDI – Perjuangan menjelang pemilu 1999 di Kelurahan Polonia. Konflik terbuka antar OKP saat ini sudah mereda dan tidak terdengar lagi.

3. Perbedaan konflik yang terjadi di ketiga lokasi penelitian terutama yang terjadi antar pemuda adalah :

Dari ketiga lokasi penelitian, konflik paling berat terjadi di Kelurahan Polonia, dimana terjadi peristiwa “Panah Beracun” yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Disamping itu konflik tidak hanya terjadi di antara para pemuda yang tergabung dalam OKP tetapi juga antar anggota organisasi politik PDI dan PDI – Perjuangan.

Di Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area, konflik yang terjadi antara pemuda dan OKP tidak sampai menimbulkan korban jiwa, hanya pengrusakan/pembakaran Posko-Posko kedua OKP yang bertikai.

Di Kelurahan Lalang, konflik antar Organisasi Kepemudaan (OKP) tidak terjadi, dan tidak ada tindakan pengrusakan terhadap bangunan dan fasilitas lainnya.

4. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antar warga, terutama para pemuda antara lain: masalah generasi muda, ekonomi/kemiskinan, kejahatan/kriminal dan lingkungan. Sebagian besar para pemuda yang terlibat konflik adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), keterbatasan pendidikan dan keahlian/keterampilan yang dimiliki serta pengaruh krisis moneter mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sebagian para pemuda bergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) yang umumnya menghidupi organisasi dan anggotanya dari penguasaan terhadap jasa

pengamanan dan perparkiran. Perebutan lahan antar OKP sering menyebabkan timbulnya konflik.

5. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penyelesaian suatu konflik berbeda-beda penanganannya, tergantung dari bentuk konflik dan akibat yang ditimbulkannya. Ada tiga model penyelesaian konflik yang ditempuh, yaitu :
  - a. Penyelesaian konflik tidak mengundang pihak lain (pihak ketiga) dan konflik itu didiamkan saja, atau diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih (*Konsiliasi*).
  - b. Dalam penyelesaian konflik, mengundang dan menerima nasehat pihak ketiga, dimana penerimaan terhadap nasehat pihak ketiga bersifat fakultatif (*Mediasi*).
  - c. Konflik yang terjadi sudah sedemikian rupa, sehingga tanpa di undang/diberitahu pihak ketiga (aparat keamanan). Wajib membantu menyelesaikan konflik tersebut (*Arbitrasi*).
6. Keserasian sosial masyarakat turut dipengaruhi oleh adanya pembinaan warga oleh aparat pemerintahan, dalam hal ini Lurah dan jajarannya, serta BABINSA (Koramil). Kerjasama dan partisipasi warga masyarakat di ketiga lokasi penelitian dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlangsung cukup baik.

## B. Saran

1. Mengingat terjadinya konflik umumnya di antara para pemuda, maka perlu diadakan pembinaan terhadap para pemuda secara lebih baik. Perlu diupayakan adanya wadah organisasi pemuda yang dapat menyalurkan kebutuhan mereka, dan mampu menggugah kesadaran para pemuda agar mempunyai arah tujuan dalam hidup, sehingga tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan merusak.
2. Kerjasama dan partisipasi warga masyarakat dengan aparat pemerintahan (Lurah dan aparatnya) dan aparat ketertiban dan keamanan (Koramil dan Kepolisian) harus dapat dipelihara dengan baik dan selalu ditingkatkan, agar keserasian sosial diantara warga selalu terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, M. Alwi dan Kismadi, M.S. 1986. *Mengembangkan Konsep Keresasian Sosial*. Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial: Mempersiapkan Masyarakat Masa Depan, Ujung Pandang.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa - Kritik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Garna, K. Yudistira. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana – UNPAD.
- Ketetapan MPR – RI No. II Tahun 1993 tentang: *Garis-Garis Besar Haluan Negara*.
- Kusnadi. 04 Maret 2001. *Negara, Kelompok Etnik, dan Konflik Sosial*. Kompas, hlm. 29.
- Lawang, Robert, M.2. 1986. *Sistem Sosial Indonesia I*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Malo, Manasse. 1986. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika - Universitas Terbuka.
- Pelly, Usman. 1993. Laporan Penelitian: *Pedoman Pengelolaan Keresasian Sosial*. Kerja sama Kantor Menteri Negara KLH dengan PUSDIP-KLH IKIP Medan.
- Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian UNPAD Bandung kerja sama dengan Kantor Menteri Negara KLH. 1992. *Panduan Pelaksanaan Pengukuran Keresasian Sosial*. Bandung.



- Qodari, Muhammad. 21 Feb 2000. *Malaise Ekonomi, Prasangka Etnis – Agama, dan Pertikaian Sosial*. Kompas, hlm. 4.
- Salim, fahrudin. 16 Februari 2000. *Konflik Sosial, Kekerasan, dan Integrasi Nasional*. Kompas, hlm. 4.
- Singarimbun, Masri dan Effendi. Sofian (penyunting). 1983. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparlan, Parsudi (ketua tim). 1989. *Interaksi Antar-Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*. Jakarta: Ditjenbud., Depdikbud.
- Widiyanti, S. Ninik. 1987. *Ledakan Penduduk Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Zamroni. 1988. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta: Depdikbud.

Lampiran

## RIWAYAT HIDUP PENELITI

---

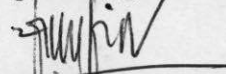
1. Nama : Dra. Hernawaty Damanik  
 NIP : 131787137  
 Unit Kerja : FKIP- UT / UPBJJ – UT Medan  
 Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar / 23 Januari 1963  
 Pendidikan : Sarjana Pendidikan Jurusan PMP – KN
  
2. Penataran / Pelatihan / Seminar yang diikuti :
  1. Pelatihan Menulis Lanjut, IKIP Medan, 1993.
  2. Seminar Pergulatan Metodologi dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif, IKIP Medan, 1993.
  3. Pelatihan Tutor Pendidikan Guru Rumpun Bidang Studi, kerjasama Dikmenum dengan UT, Padang, 1994.
  4. Pemakalah dalam Seminar Sehari UPBJJ-UT Medan, Belajar Mandiri dan Teknik Mempelajari Modul, Medan, 1994.
  5. Seminar-Lokakarya III Proyek Perintis Pengembangan UPBJJ-UT, kerjasama UT / CIDA / OLA, Jakarta, 1995.
  
3. Pengalaman Lapangan :
  1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kodya Medan (Thesis Sarjana), Medan, 1986.
  2. Penelitian tentang Penelaahan Modul Pendidikan Pancasila (MKDU 4104), Medan, 1990.
  3. Penelitian tentang Pemahaman Mahasiswa PMP-KN FKIP-UMSU

terhadap hak dan Kewajiban Warga Negara, Medan, 1994.

4. Penelitian tentang Profil Mahasiswa UPBJJ-UT Medan Masa Registrasi 95.2, Medan, 1995,
5. Perbedaan hasil Belajar Mahasiswa DII-PGSD Proyek dan Swadana di Kodya Binjai, 1996.
6. Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Siswa Mengulang Kelas di Sekolah Dasar Propinsi Sumatera Utara (Ketua), 1997.
7. Pola Perubahan Peranan Wanita akibat Pertumbuhan Industrialisasi di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, 1998.

Medan, Maret 2001

Yang bersangkutan,



Dra. Hernawaty Damanik

NIP. 131787137

Universitas Terbuka

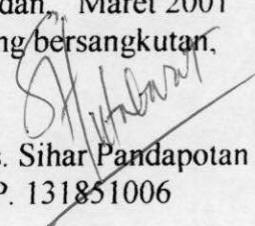
## RIWAYAT HIDUP PENELITI

---

1. Nama : Drs. Sihar Pandapotan  
Alamat Rumah : Jl. Umar No. 102  
Glugur Darat, Medan (20238)  
Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar / 22 Juni 1957  
Pendidikan Terakhir : Sarjana Pendidikan Jurusan  
Antropologi  
Pekerjaan : Tenaga Edukatif pada UPBJJ-UT  
Medan  
Alamat Kantor : UPBJJ-UT Medan  
Jl. Stadion No. 24 Medan (20217)
2. Kursus / Penataran / Pelatihan yang diikuti :
1. Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, USU Medan, 1991.
  2. Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Komunikasi bagi Staf UPBJJ-UT Seluruh Indonesia Angkatan III (Pengujian) sebagai Peserta, Mei 1994.
  3. Pelatihan Tutor Pendidikan Guru Rumpun Bidang Studi Keguruan, Kerjasama Dikmenum dengan UT, Padang, Oktober 1994.
3. Pengalaman Lapangan :
1. Penelitian Tentang Suku Bangsa Keling di Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan, Wakil Ketua, Medan, 1982.
  2. Pengumpulan dan Penyelamatan Data-data Silsilah Secara Lisan di Daerah Batak Toba Sumut, Proyek Penelitian Lembaga Silsilah Secara Lisan di Daerah Batak Toba Sumut, Proyek Penelitian Lembaga Silsilah Indonesia, Jakarta, anggota, dari tahun 1979 – 1982.

3. Sistem Perkembangan Desa di Tapanuli Utara (Kasus Desa Sosor Liang Kecamatan Sipahutar), Skripsi Sarjana, Medan, 1983.
4. Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Keekerabatan daerah Sumatera Utara, sekretaris tim, tahun 1984.
5. Studi Dampak Perkembangan Lapangan Kerja terhadap Hubungan Keekerabatan pada Suku Bangsa Melayu di Kodya Medan, sekretaris tim, 1986.
6. Survey tentang Pandangan dan Sikap Masyarakat Melayu terhadap Pendidikan Anak, anggota, 1986
7. Pandangan dan Sikap Dosen FPIPS- IKIP Medan terhadap keberadaan Universitas Terbuka, Mandiri 1992.
8. Pengaruh Nilai Budaya terhadap Tata Ruang Pemukiman Perumnas (Kasus Kodya Medan) Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Utara. Depdikbud Medan, anggota. 1995
9. Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Siswa Mengulang Kelas di Sekolah Dasar Propinsi Sumatera Utara (Ketua), 1997.

Medan, Maret 2001  
Yang bersangkutan,

  
Drs. Sihar Pandapotan  
NIP. 131851006

**SURAT PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**  
**PUSAT STUDI INDONESIA - LEMBAGA PENELITIAN UT**  
**NOMOR: 4666 /J31.2.3/PG/2000**

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2000 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tian Belawati** : Kepala Pusat Studi Indonesia (PSI) Lembaga Penelitian Universitas Terbuka selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Dra. Hernawati Damanik** : Sebagai Ketua Peneliti dalam hal ini berkedudukan di UPBJJ UT Medan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan tugas penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas penelitian berjudul "**Keserasian sosial pada daerah pemukiman di Kodya Medan (Studi kasus di tiga pemukiman)**" yang Pelaksanaannya di ketuai oleh **Dra. Hernawati Damanik**.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 3.394.250,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)\* dan pembayarannya dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Tahap pertama (30%) sebesar Rp 587.250,- (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Tahap kedua (50%) sebesar Rp 2.005.000,- (Dua juta lima ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I sesuai format laporan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Tahap ketiga (20%) sebesar Rp 802.000,- (Delapan ratus dua ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir pelaksanaan penelitian sesuai format laporan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

\*) Jumlah ini telah dipotong PPh sebesar 15%. Jumlah PPh dikurangkan/diambil dari pembayaran Tahap I

### Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menjadi Peneliti Utama pada penelitian lain dan menjadi Anggota Peneliti pada lebih dari satu judul penelitian lain yang didanai UT dalam waktu yang sama dengan penelitian ini.
- (2) PIHAK KEDUA tidak sedang mengikuti pendidikan lanjutan (S2, S3) pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Perubahan pelaksanaan kegiatan hanya dibenarkan apabila mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 di atas selambat-lambatnya tanggal 31 bulan Januari tahun 2001 sesuai dengan proposal yang sudah disetujui.
- (2) PIHAK KEDUA harus melakukan seminar draft laporan penelitian yang di koordinasi oleh PSI. Seminar ini bertujuan untuk memperoleh masukan bagi laporan final penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil akhir penelitian pada PIHAK PERTAMA dalam bentuk laporan dan makalah sesuai dengan yang tercantum pada buku "Pedoman Penelitian dan Pengembangan", Lembaga Penelitian UT.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam waktu maksimal 2 bulan terhitung dari batas waktu sesuai dengan Butir (1), PIHAK KEDUA dianggap tidak mampu menyelesaikan penelitiannya dan harus mengembalikan 75% dari jumlah dana penelitian yang telah diterima.

### Pasal 5

Laporan pelaksanaan kegiatan yang tersebut pada Pasal 4, di atas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Ukuran Kertas A4
- (2) Warna kulit biru tua
- (3) Ketikan 2 spasi
- (4)
 

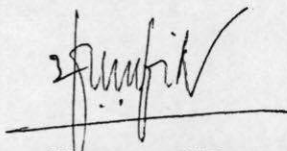
a. Margin kiri	4 cm
b. Margin kanan	3 cm
c. Atas	3 cm
d. Bawah	3 cm

**Pasal 6**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Peneliti sebelum pelaksanaan perjanjian selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada peneliti baru yang menggantikannya atas persetujuan tertulis Kepala Pusat Studi Indonesia dan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Penelitian sebagai hasil akhir pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 (lima) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA. Laporan hasil penelitian ini menjadi milik PIHAK PERTAMA.

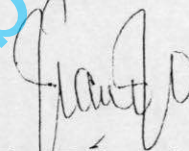
Demikian surat perjanjian ini dibuat, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat perjanjian ini akan ditinjau kembali.

YANG MENERIMA PEKERJAAN  
PIHAK KEDUA,



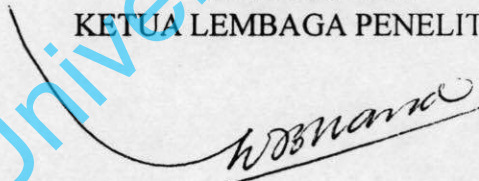
**Dra. Hernawati Damanik**  
NIP

YANG MENYERAHKAN PEKERJAAN  
PIHAK PERTAMA,



**Dr. Tian Belawati**  
NIP 131569974

MENGETAHUI  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN



**WBP. Simanjuntak, M.Ed., Ph.D**  
NIP 130212017





# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Lt. III, Telp. 4517646, Fax. 4571753  
MEDAN - 20112

### SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/ 3773 /2000

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Medan Nomor : 506/SK/1980, Tanggal 3-7-1980 dan setelah membaca/memperhatikan :  
Surat dari : Bappeda Tk. I Sumatra Utara Tanggal 06 Nopember 2000,  
Nomor: 070/461/SK/BPSU/II/2000 Tentang Permohonan izin Penelitian.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dengan ini memberikan rekomendasi/Izin Penelitian untuk mengadakan Penelitian Kepada :

N A M A : DRA. HERMAWATY DAMANIK.  
A L A M A T : Jl. Stadion 24 Medan.  
PEKERJAAN : Dosen.  
NAMA PESERTA : -----  
J U D U L : " KESERASIAN SOSIAL PADA DAERAH PEMUKIMAN DI KODYA MEDAN . "

Lokasi Penelitian : Kecamatan Medan Sunggal, Polonia, Area.  
Lama Penelitian : 3 ( Tiga ) Bulan.  
Penanggung Jawab : Ketua LP. Univ. Terbuka.

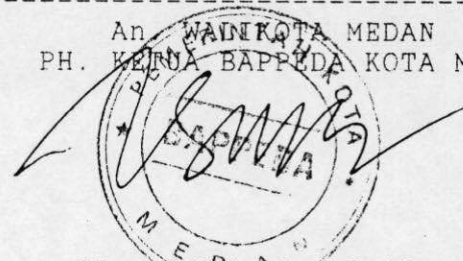
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri kepada Kepala Kantor Instansi Setempat.
2. Harus mematuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Medan.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul yang dimaksud.
4. Dua set hasil lengkap penelitian harus sudah diserahkan kepada Wali-kota Medan c/q Ketua Bappeda Kota Medan selambat-lambatnya dua bulan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.
5. Surat izin penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan apabila ternyata pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Surat izin penelitian ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan .  
0.1m1

Bersedia memenuhi  
Ketentuan Butir 1 s.d 6  
Pemegang Izin

Dikeluarkan di : M E D A N  
Pada Tanggal : 14 NOVEMBER 2000

An. WAIKOTA MEDAN  
PH. KETUA BAPPEDA KOTA MEDAN



IR. IRMAN DJ. OEMAR, MSi.  
P E N A T A  
NIP. 010231196, -

- Tempusan :
1. Kakan Sospol Kota Medan.
  2. Camat Medan Area Kota Medan.
  3. Camat Medan Sunggal Kota Medan
  4. Camat Medan Polonia.
  5. Ketua LP. Terbuka .
  6. Pertiinggi.



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 21 - A Telp. 4538045, 4517306, Fax. (061) 4513830

MEDAN- 20152

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

No. 070 / 461 / SK/BPSU/II/ 2000

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tgl 10 - 5- 1982 No. 050. I / 635 / Bangda dan Surat Edaran Gubernur Sum. Utara tgl. 15 - 12 - 1982 No. 050 I / 32928 / II. 380 / BPSU / II / 82 dan setelah membaca / memperhatikan :

1. Surat dari..... Univ. Terbuka  
 tgl. ....11 Oktober 2000..... No. ....09/J31.10/II/2000.....tentang permohonan Izin penelitian
2. Surat Dit Sospol Prop. Sum.Utara tgl..... 31 Oktober 2000..... No. ....070/4770.....  
 tentang rekomendasi untuk hal tersebut diatas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prop.Sumatera Utara dengan ini memberikan rekomendasi/ Izin untuk mengadakan Penelitian kepada :

Nama : Dra.Hermawaty D-manik  
 Alamat : Jl. Stadion 24 Medan  
 Pekerjaan : Dosen  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : Kesenjangan Sosial pada Daerah pemukiman di Kota Medan  
 Daerah Penelitian : Kota Medan  
 Lamanya : 3 Bulan  
 Pengikut / Peserta : 2 Orang  
 Penanggung Jawab : Ketua LP.Univ.Terbuka

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada kepala Daerah setempat.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia Khususnya di daerah penelitian.
3. Menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai/ menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian ini.
5. Sesudah penelitian berakhir sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor kepada Pemda setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian.
6. Selambatnya- lambatnnya 3 ( tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Perencanan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara, cq Bid.Penelitian Bappedada.
7. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan diatas.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7  
 Pemegang Izin Penelitian :

1. Kadit Sospol. Pk.I. SU  
 tembusan ke kota Medan  
 3. Ketua LP. Univ. Terbuka

Dikeluarkan di : Medan  
 Pada Tanggal: 6 Nopember 2000

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 PROPINSI SUMATERA UTARA**

Sekretaris,

Ir. Bintara Thahir, MSi  
 Pembina Pk.I  
 Nip. 90026774



# PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

Jalan Letjend T.B. Simatupang No. 193 Telepon : 8458374  
M E D A N

Nomor : 070 / 235  
Lampiran : --  
Perihal : Izin penelitian.

Medan, 09 Desember 2000.-

Kepada Yth :

Sdr. Lurah Lalang.

Di

M E D A N . -

- Sehubungan dengan surat Keterangan/Izin Penelitian dari Ketua BAPPEDA Kota Medan No 070/3773/2000 tgl. 14 Nopember 2000, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas.
- Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa akan dilaksanakan penelitian diwilayah Kecamatan Medan Sunggal oleh :  
Nama : Dra. Hermawaty Damanik.  
Alamat : Jl. Stadion no. 24 Medan.  
Pekerjaan : Dosen.  
Nama peserta : -  
Judul : "Keseserasian Sosial pada Daerah Pemukiman di Kota Medan"  
Lokasi penelitian : Kelurahan Lalang Kec. Medan Sunggal.  
Lama penelitian : 3(tiga) Bulan.  
dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Lurah setempat.
  - Tidak dibenarkan mengadakan penelitian terhadap hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
  - Harus mematuhi segala peraturan yang berlaku diwilayah setempat.
  - 1 (satu) set hasil penelitian harus disampaikan kepada Camat Medan Sunggal.
- Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dimaklumi dan sepe<sup>r</sup> lunya.-





PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN AREA  
KELURAHAN TEGAL SARI I

81343.PDF

Alamat Kantor : Jl. A.R. Hakim Gg. Kantil No. 26 Telp. 7343849 Medan - 20216

Nomor .: 070/ 13  
Lemp .: -  
Perihal.: Izin Penelitian.

Medan, tgl 9 Februari 2001.  
Kepada Yth.:  
Sdr. Kepala Lingkungan III Kel. Tegal  
Seri-I.

di -

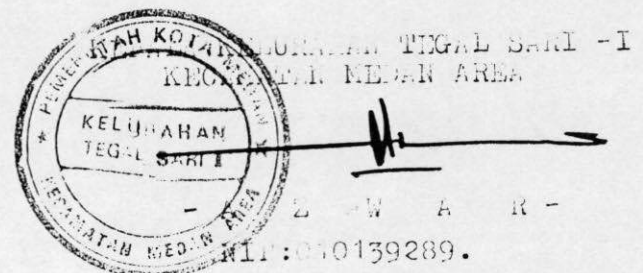
M e d a n .

Berdasarkan Surat Camat Medan Area Nomor. 070/ 1697 tanggal 20 Nopember 2000 perihal seperti pada pokok surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan surat Izin Penelitian kepada :

N a m a : Dra. Hermawaty Damanik.  
A l a m a t : Jln. Stadion No.24 Medan  
Pekerjaan : Dosen  
J u d u l : " KEBERSIARAN SOSIAL PADA DAMPAH  
PERUMAHAN DI KOTA MEDAN.  
Lokasi Penelitian : Lingkungan III Kelurahan Tegal  
Seri-I Kec. Medan Area  
Lama Penelitian : 3 ( bulan )  
Penanggung Jawab : Ketua D. Univ. Terbuka.

Sejalan dengan hal tersebut diatas diminta bantuan kepada Warga Masyarakat lingkungan III Kelurahan Tegal Seri-I untuk memberikan data-data yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



cc. Bertinggal.

PEMERINTAH KOTA MEDAN  
KECAMATAN MEDAN POLONIA

81343.PDF

JALAN DC BARITO NO. 3 TELP. 7867035  
MEDAN - 20157

Medan, 14 Desember 2000

Nomor : 070 / 11167.  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian.

Kepada  
Yth : Sdr. Lurah Polonia Kecamatan  
Medan Polonia  
di -

M e d a n.

1. Berdasarkan Surat Ketua Bappeda Kota Medan nomor : 070/3773 tanggal 14 Nopember 2000, perihal pada pokok surat diatas, dengan ini diberikan Izin kepada :

Nama : DRA. HERMANATY DAMANIK.  
Alamat : Jl. Stadion No. 24 Medan.  
Pekerjaan : Dosen.  
Nama Peserta : 1. Drs. SIHAR PANDAPOTAN.  
2. Dra. B. ESTHI PRAMUKI.  
Judul : " KESERASIAN SOSIAL PADA DAERAH PEMUKIMAN DI -  
KODYA MEDAN".  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia.  
Lama Penelitian : 3 ( tiga ) Bulan.  
Penanggung Jawab : Ketua IP Univ Terbuka.

2. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2.1. Sebelum mengadakan Penelitian terlebih dahulu harus melaporkan -  
diri ke Instansi setempat ( Kantor Lurah ).  
2.2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Wilayah  
Kota Medan.  
2.3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya -  
dengan judul.  
2.4. Dua set hasil Penelitian harus diserahkan kepada kami selambat -  
lambatnya 2 ( dua ) Bulan setelah Penelitian selesai.  
2.5. Surat Penelitian ini batal atau tidak mendapat Izin dari Pemerin  
tah Kota Medan, apabila ternyata pemegang Izin tidak mengindah -  
kan ketentuan diatas.  
2.6. Surat Izin Penelitian berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

3. Demikian Surat Izin Penelitian ini disampaikan untuk dipergunakan se-  
perlunya.-



Nomor Angket : .....

**ANGKET**

**KESERASIAN SOSIAL PADA DAERAH PEMUKIMAN DI KODYA  
MEDAN  
( Studi Kasus di Tiga Pemukiman )**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan.
3. Alamat : .....
4. Umur : ..... Tahun
5. Pekerjaan : .....
6. Pendidikan : .....
7. Jumlah anak : ..... Terdiri dari laki-laki : .... Orang.  
Perempuan : .... Orang.
8. Pendidikan Anak : a. .... SD  
b. .... SLTP  
c. .... SLTA  
d. .... Perg. Tinggi  
e. ....

**II. Pertanyaan**

1. Sudah berapa lama Saudara tinggal disini ini ?  
a. Kurang dari 5 tahun                      c. 10 – 15 tahun  
b. 5 – 10 tahun                                  d. .... tahun
2. Sebelumnya tinggal dimana ?  
a. Di lain kelurahan satu kecamatan.  
b. Di kecamatan lain di Kodya Medan.  
c. Di luar Kodya Medan.
3. Mengapa Saudara memilih tinggal disini ?  
a. Daerahnya cukup aman.  
b. Dekat dengan teman sekampung.  
c. Dekat dengan tempat kerja.  
d. ....
4. Tetangga Saudara terdiri dari etnis apa saja ?  
a. Berbagai suku bangsa, satu agama.  
b. Satu suku bangsa, berbeda agama.  
c. Satu suku bangsa, satu agama.  
d. ....
5. Bagaimanakah hubungan Bapak/Ibu dengan jiran tetangga selama ini ?  
a. Cukup akrab.  
b. Biasa saja.  
c. Kurang harmonis.  
d. ....

6. Pernahkah Bapak/Ibu meminta bantuan (tolong) dengan tetangga tersebut ?
  - a. Tidak pernah
  - b. Sese kali
  - c. Sering sekali
  - d. Sangat sering sekali
7. Jika pernah, bantuan tersebut berupa (dalam rangka) :
  - a. Meminjam uang
  - b. Bantuan tetangga *tenaga*
  - c. Menjaga rumah
  - d. ....
8. Demikian juga sebaliknya, pernahkah Bapak/Ibu dimintai bantuan tolong oleh tetangga tersebut ?
  - a. Pernah.
  - b. Tidak pernah
9. Jika pernah, bentuk bantuan tersebut yang diberikan adalah berupa (dalam rangka):
  - a. Bantuan uang.
  - b. Bantuan tenaga
  - c. Menjaga rumah
  - d. ....
10. Biasanya anak-anak Bapak/Ibu bergaul dengan siapa ?
  - a. Dengan anak-anak tetangga sebelah rumah.
  - b. Dengan teman satu sekolah
  - c. Dengan anak-anak satu kampung
  - d. Di rumah saja
11. Apabila Bapak/Ibu mendapat undangan dari tetangga/penduduk di daerah ini yang berbeda suku bangsa dan agamanya, apakah Bapak/Ibu akan datang untuk menghadirinya ?
  - a. Ya.
  - b. Tidak
12. Jika tidak, apa alasannya ?
  - a. Tidak ada waktu
  - b. Dilarang oleh adat/agama
  - c. Melihat situasi dan kondisi.
  - d. Hubungan kurang akrab
13. Apakah di daerah ini ada terbentuk STM (Serikat Tolong Menolong) ?
  - a. Ada.
  - b. Tidak.
14. Jika ada, apakah Bapak/Ibu turut sebagai anggota STM tersebut ?
  - a. Ya.
  - b. Tidak
15. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan bersih lingkungan di daerah ini, pada umumnya setiap warga diwajibkan untuk turut berpartisipasi di dalamnya (gotong royong), siskamling). Bagaimana sikap anda terhadap hal ini ?
  - a. Sangat setuju, demi kebersamaan.
  - b. Setuju untuk kepentingan bersama.
  - c. Kurang setuju, karena kurang ada manfaatnya.
  - d. Kurang setuju, cukup diupayakan kepada orang lain saja.

16. Pernahkah Saudara merasa terhalang untuk bergaul karena alasan perbedaan tertentu ?

- a. Ya b. Tidak.

17. Jika <sup>ibu</sup> ya, contoh konkrit dari pergaulan yang akrab tersebut berupa :

- a. Saling kunjung-mengunjungi pada hari raya/tahun baru/imlek..  
b. Membentuk suatu wadah/perkumpulan.  
c. Menghadiri dan menyumbang pada saat kemalangan/ditimpa musibah.  
d. ....

18. Apakah di daerah pemukiman ini pernah terjadi konflik yang menjurus ke arah yang bersifat negatif ?

- a. Pernah b. Tidak pernah

19. Jika pernah, bentuk konflik tersebut adalah :

(Jawaban dapat lebih dari satu)

- a. Konflik antar anak muda.  
b. Konflik antar sesama organisasi kepemudaan (OKP).  
c. Konflik antar gang/lingkungan.  
d. Konflik antar tetangga.  
e. ....

20. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut ?

- a. Masalah anak muda.  
b. Masalah berebut lahan  
c. Karena pengaruh Miras (Minuman Keras).  
d. ....

21. Akibat terjadinya konflik di daerah ini, bagaimana cara mengatasinya ?

- a. Pernah b. Tidak pernah

22. Jika pernah, akibat yang pernah Bapak/Ibu alami adalah :

- a. Rumah hancur.  
b. Barang-barang dijarah.  
c. Anak menjadi korban  
d. Sering diintimidasi/diteror

23. Apabila terjadi konflik di daerah ini, bagaimana cara mengatasinya ?

- a. Pelaku dilaporkan ke Polisi.  
b. Didamaikan dengan musyawarah.  
c. Didiamkan saja.  
d. ....

≈ Terima Kasih ≈



<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>
--------------------------

<b>TANGGAL WAWANCARA :</b>	.....
<b>KELURAHAN :</b>	.....
<b>KECAMATAN :</b>	.....
<b>PETUGAS :</b>	.....

**KESERASIAN SOSIAL PADA DAERAH PEMUKIMAN DI KODYA  
MEDAN  
(STUDI KASUS DI TIGA PEMUKIMAN)**

**Petunjuk :** Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang aspek kehidupan sosial yang dapat memicu munculnya konflik dan mempengaruhi keserasian sosial di pemukiman daerah kodya Medan.

**Pertanyaan :**

**A. Identitas Informan :**

Nama : ..... (Lk/Pr)\*  
 Alamat : .....  
 Umur : ..... Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SD/SLTP/SLTA/PT\* .....  
 Pekerjaan / Status : .....  
 Agama : Islam/K.Protestan/Katholik/Hindu/Budha\*  
 Kewarganegaraan/Suku Bangsa : WNI/WNA/Suku : .....  
 Lama bermukim di daerah ini : ..... Tahun.

**B. Kehidupan Sosial / Keserasian Sosial :**

1. Apa alasan Saudara/Bapak/Ibu memilih pemukiman (tinggal) di tempat ini ?
2. Adakah perbedaan yang menonjol antar anggota masyarakat dilihat dari perbedaan suku, agama, adat istiadat dan kebiasaan serta stratifikasi sosial ?
3. Jika tetangga saudara berbeda suku dan/atau agama dengan saudara, Bagaimana tindakan saudara ?
4. Pernahkah Sdr/Bpk/Ibu mengalami masalah (konflik) dengan jiran tetangga/masyarakat di sekitar tempat tinggal Saudara.  
Jika ya, dapatkah diceritakan penyebab munculnya konflik tersebut.

\*Coret yang tidak perlu

5. Apakah masalah-masalah berikut terdapat didaerah pemukiman ini

(jawaban dapat lebih dari satu)	<u>Ya</u>	<u>Tidak</u>
a. Masalah ekonomi/kemiskinan	: ....	.....
b. Masalah ketimpangan sosial	: ....	.....
c. Masalah disorganisasi keluarga	: ....	.....
d. Masalah kejahatan/kriminal	: ....	.....
e. Masalah Generasi Muda	: ....	.....
f. Masalah Agama dan Moral	: ....	.....
g. Masalah Kependudukan	: ....	.....
h. Masalah Lingkungan Hidup	: ....	.....
i. Masalah Pembangunan	: ....	.....

6. a. Masalah manakah yang paling sering mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat?

b. Bila ya, mohon dijelaskan bentuk-bentuk konflik tersebut.

7. Apakah dengan adanya konflik di atas mengakibatkan terjadinya tindakan seperti berikut ini :

	<u>Ya</u>	<u>Tidak</u>	<u>Frekwensi</u>
a. Tindak kekerasan	: ....	.....	..... kali
b. Perkelahian	: ....	.....	..... kali
c. Pengrusakan/Pembakaran pertokoan	: ....	.....	..... kali
d. Pengrusakan/Pembakaran tempat ibadah	: ....	.....	..... kali
e. Pengrusakan	: ....	.....	..... kali
f. Perkosaan	: ....	.....	..... kali
g. Pembunuhan	: ....	.....	..... kali

8. Menurut Sdr/Bpk/Ibu, bila muncul konflik seperti tersebut di atas, upaya apakah yang perlu dilakukan ?

9. Apakah sikap berikut ini terdapat pada anggota masyarakat di pemukiman ini ?

	<u>Ya</u>	<u>Tidak</u>	Jika ya, bagaimana wujudnya ?
a. Saling mencurigai	: ....	.....	
b. Berprasangka negatif	: ....	.....	
c. Kecemburuan sosial	: ....	.....	
d. Sikap antipati	: ....	.....	

10. Pernahkah diadakan kesepakatan dan peraturan yang dibuat masyarakat untuk mengupayakan keserasian hidup bersama dalam masyarakat ?
11. Apakah bentuk penyelesaian konflik berikut ini pernah diterapkan : Ya Tidak
- |                                     |      |       |
|-------------------------------------|------|-------|
| a. Berdamai dengan kesadaran diri   | .... | ..... |
| b. Didamaikan pihak ketiga          | .... | ..... |
| c. Ada intervensi dari pihak aparat | .... | ..... |
12. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan pemimpin di daerah ini dalam menanggulangi konflik yang muncul ?

- Terima Kasih -

Universitas Terbuka

<b>PEDOMAN OBSERVASI</b>
--------------------------

<b>TANGGAL OBSERVASI :</b>	.....
<b>Kelurahan/Kec.</b>	: .....
<b>Observer</b>	: .....

**" KESERASIAN SOSIAL PADA DAERAH PEMUKIMAN DI KODYA MEDAN "**  
**(Studi Kasus di Tiga Pemukiman)**

**Petunjuk :** \* Pedoman observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberagaman masyarakat di pemukiman daerah kodya Medan. Dan melihat secara riil dinamika kehidupan sosial masyarakat untuk mengetahui tingkat keserasian sosial daerah pemukiman di Kodya Medan.

\* Beri tanda  pada pilihan yang tersedia.

**I. Gambaran umum keadaan penduduk di daerah pemukiman dilihat dari aspek kelompok etnis, agama, tingkat sosial dan ekonomi.**

1. Keragaman etnis/suku bangsa :  homogen  heterogen
2. Kelompok etnis yang ada :  Jawa  China  
(urutkan sesuai banyaknya)  Batak  Tamil  
 Melayu  Arab  
 Minang Lainnya : .....
3. Keadaan umum bangunan tempat tinggal penduduk :  
 sederhana  semi permanen  permanen  gedung mewah
4. Secara umum tingkat ekonomi masyarakat setempat :  
 menengah ke bawah  menengah  menengah ke atas
5. Tingkat integritas masyarakat :  
 kurang  cukup  tinggi
6. Tingkat mobilitas sosial masyarakat sehari-hari :  
 kurang  cukup  tinggi
7. Penataan lingkungan pemukiman penduduk :  
 tertata baik  kurang tertata  tidak tertata/kumuh

## 8. Kegiatan sosial kemasyarakatan :

Gotong royong ..... Siskamling ..... STM .....

## 9. Keberadaan organisasi sosial/perkumpulan masyarakat :

(Tuliskan namanya)

- a. Organisasi kepemudaan : .....
- b. Organisasi keagamaan : .....
- c. Perkumpulan olah raga : .....
- d. Sanggar seni : .....
- e. Arisan lingkungan/Kelurahan : .....
- f. Serikat Tolong Menolong : .....
- g. Dll. Sebutkan .....

**II. Masalah Kesenjangan Sosial :**

## 1. Ada tidaknya sikap yang dimiliki masyarakat dipemukiman meliputi :

- Rasa curiga : Ya Tidak
- Berprasangka negatif : ....
- Kecemburuan sosial : ....
- Keterbukaan : ....

## 2. Ada tidaknya tanda-tanda terjadinya konflik terbuka di daerah tersebut, seperti :

- |  | <u>Ada</u> | <u>Tidak</u> |
|--|------------|--------------|
| - Tindak kekerasan                                       | : .....    | : .....      |
| - Perkelahian  | : .....    | : .....      |
| - Kerusuhan (pembakaran/pengrusakan<br>Rumah/gedung dll) | : .....    | : .....      |

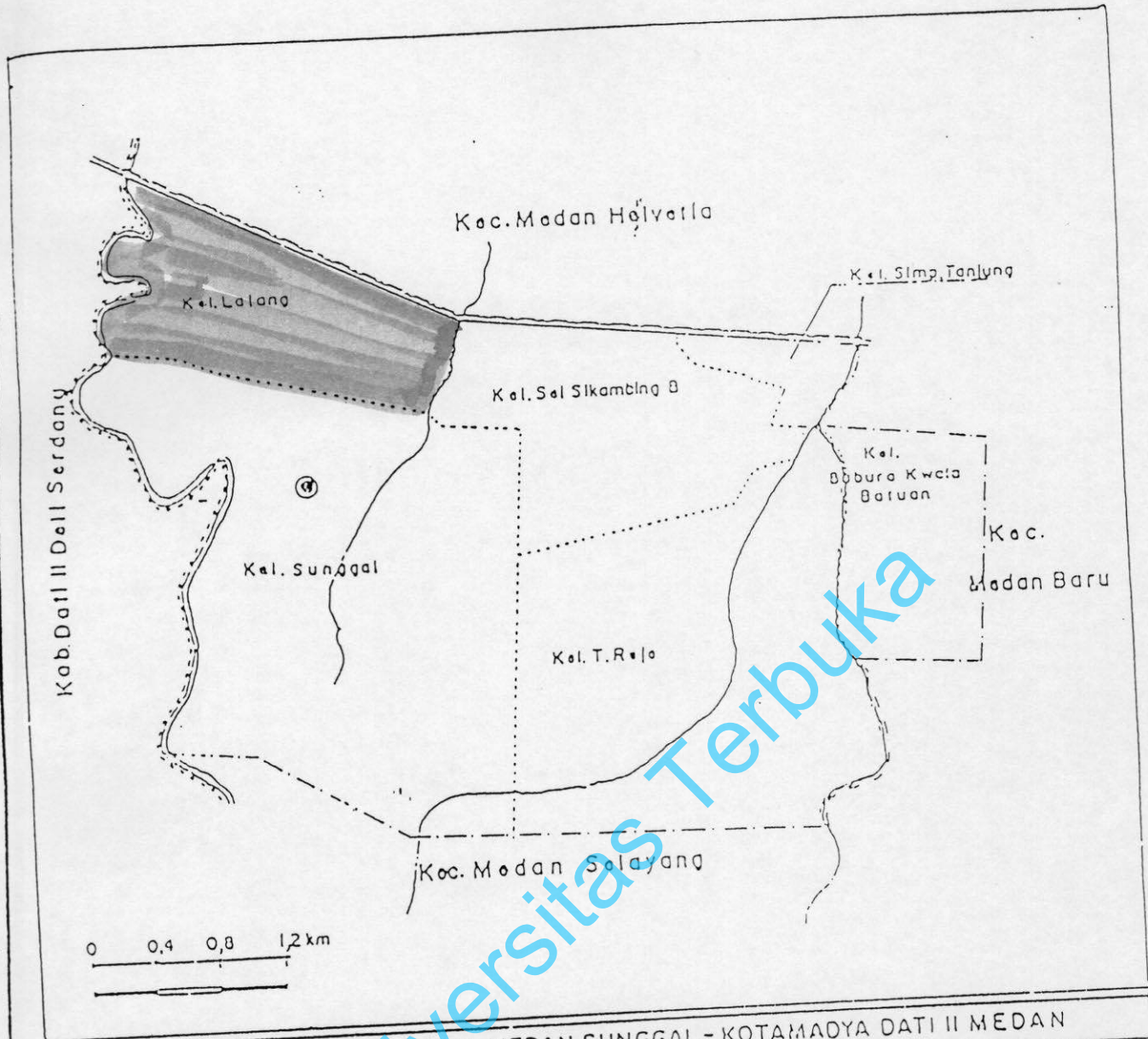
## 3. Bagaimana tingkat keserasian sosial di daerah pemukiman :

- tinggi     sedang     cukup     kurang

- Terima Kasih -

## DAFTAR INFORMAN

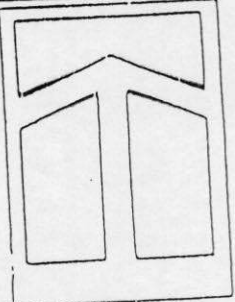
NO	N A M A	USIA	PEKERJAAN	SUKU	TEMPAT TINGGAL
1.	Sumarso	60 thn	Purnawirawan TNI	Jawa	Lingkungan III Kel.Polonia.
2.	L.Tumanggor	49 thn.	PNS	Batak	Jln. Starban - Kel.Polonia
3.	M. Salwani	42 thn	Wiraswasta	Tamil	Jln. Balai Dasa - Kel.Polonia
4.	Terro Mejo	72 thn	Pensunan Pegawai	Jawa	Jln. Balai Desa 73 - Kel.Polonia
5.	Aini	42 thn	Berdagang	Cina	Jln. Balai Desa 168- Kel.Polonia
6.	Drs. M.Sinaga	52 thn	Pegawai Swasta	Batak	Jln. Polonia - Kel.Polonia
7.	Tolbut	35 thn	Wiraswasta	Tamil	Jln.Polonia -Kel.Polonia
8.	Ikhwansyah R.	40 thn	Sekretaris Lurah	Minang	Kel. Tegal Sari I.
9.	Sugianto	46 thn	Wiraswasta	Jawa	Kel. Tegal Sari I.
10.	dr. Zulhana Lubis	50 thn	Ka.PUSKESMAS	Batak	Kel. Tegal Sari I.
11.	Ir. I.E. Siregar	59 thn	Dosen	Batak	Gg. Kantil - Kel. Tegal Sari I.
12.	Lou Wayan	46 thn	Berdagang	Cina	Gg. Kantil - Kel. Tegal Sari.
13.	Bahtiar	26 thn	Pegawai Swasta	Minang	Kel. Tegal Sari I
14.	Besrial	46 thn	Berdagang	Minang	Jln. Bakti Gg. Langgar -Tegal Sari I
15.	Subijat M. Nur	55 thn	Ka. Kelurahan	Melayu	Kelurahan Lalang
16.	Ismail Rangkuti	53 thn	Ka. Lingkungan VIII	Batak	Lingkungan VIII No.2 Kel.Lalang
17.	M. Anwar	49 thn	Wiraswasta	Jawa	Jl. Mushalla 11A Kel.Lalang
18.	Aziz	34 thn	Pegawai Swasta	Cina	Gg. Perjuangan I Kel.Lalang
19.	Tien Kartini	56 thn	Ibu Rumah Tangga	Melayu	Jln. T, B, Simatupang No.26 Kel.Lalang
20.	Seng Lie	47 thn	Berdagang	Cina	Gg. Rambutan No.10 Kel.Lalang

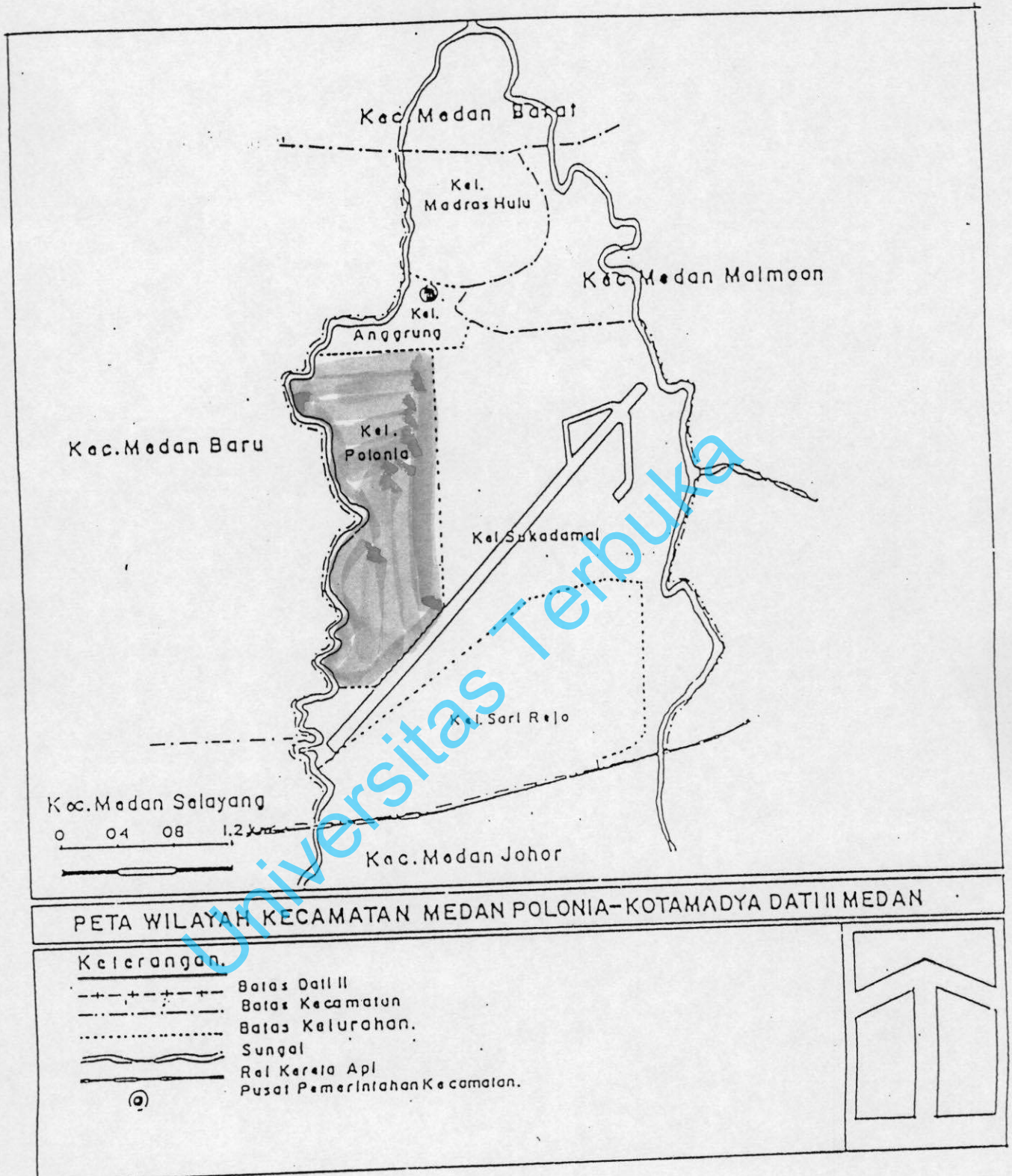


PETA WILAYAH KECAMATAN MEDAN SUNGGAL - KOTAMADYA DATI II MEDAN

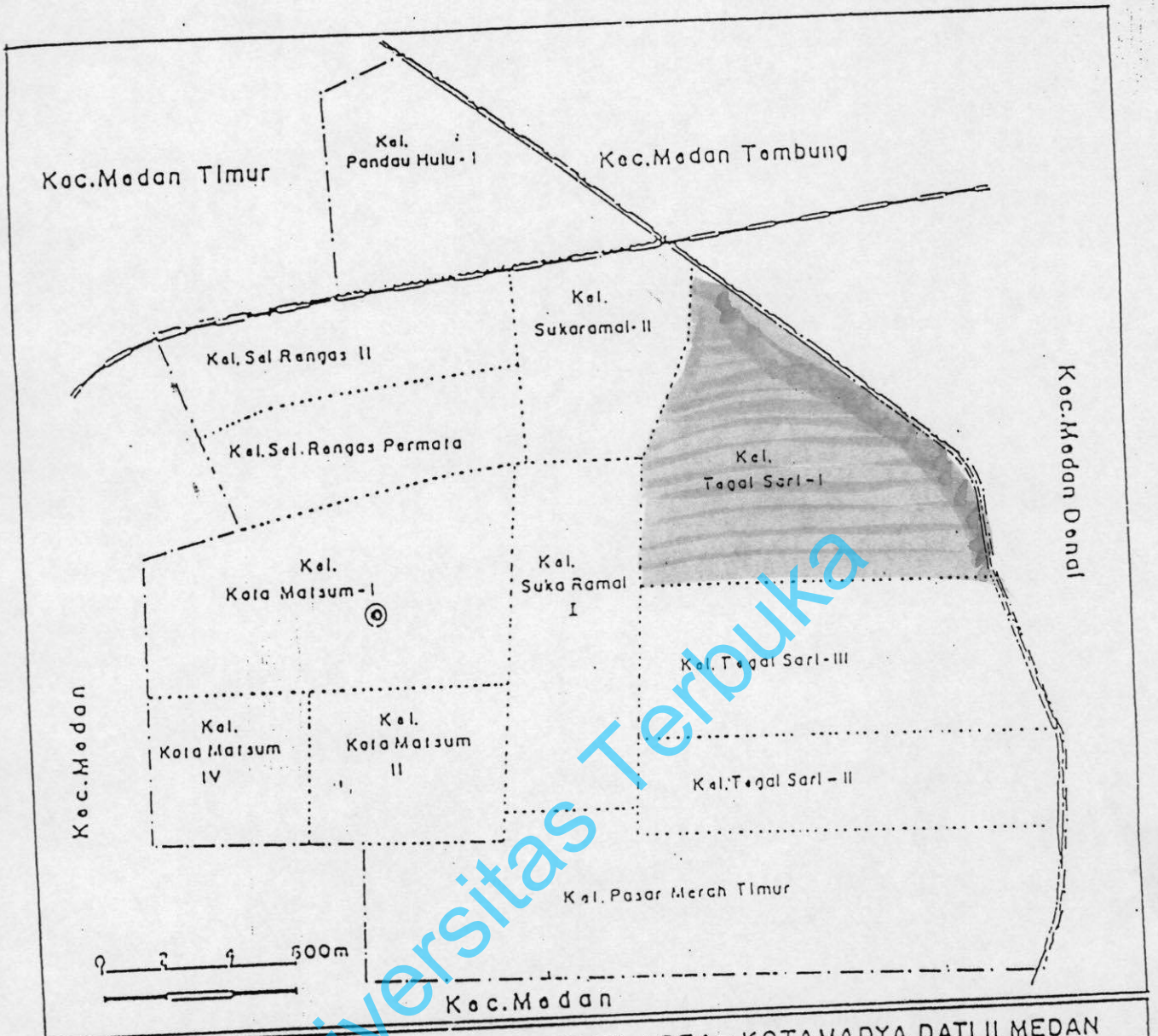
**Keterangan :**

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ---+---+---+---+ | Batas Dati II                  |
| -----            | Batas Kecamatan.               |
| .....            | Batas Kelurahan                |
| ~~~~~            | Sungai                         |
| (1)              | Pusat Pemerintahan. Kecamatan. |









PETA WILAYAH KECAMATAN MEDAN AREA - KOTAMADYA DATI II MEDAN

- Keterangan**
- +--+ Batas Dati II
  - - - - - Batas Kecamatan
  - ..... Batas Kelurahan
  - ~~~~~ Sungai
  - - - - - Rel Kereta Api
  - ⊙ Pusat Pemerintahan Kecamatan

